# STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

**(Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk**

**Memenuhi Salah Satu Persyaratan Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Dalam**

**Bidang Ilmu Politik**


**SARI BELLA PUTRI SANTOSA**

**NIM. I71216052**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU POLITIK**


**2020**

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

| | |
|---|---|
| Nama | : Sari Bella Putri Santosa |
| NIM | : I71216052 |
| Program Studi | : Ilmu Politik |
| Judul Skripsi | : Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo,Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi tersebut belum pernah diajukan pada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi tersebut benar-benar hasil karya mandiri penulisdan bukan merupakan jiplakan atau plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata di kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 3 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Sari Bella Putri Santosa

NIM. 171216052

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Sari Bella Putri Santosa

NIM : I71216052

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : "**Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)",** saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 18 Juli 2020

Pembibing

**Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si**

NIP : 196005211986081001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi oleh Sari Bella Putri Santosa dengan judul STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal 03 Agustus 2020.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji I

**Dr. H. M. Ismail, S.Sos, M.H.,M.Si**
**NIP. 196005211986082001**

Penguji II

**Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si**
**NIP. 197202062000710100**

Penguji III

**Dr. Aniek Nurhayati,M.Si**
**NIP. 19690907199403200**

Penguji IV

**Muchammad Ismail, S.Sos MA**
**NIP. 198005032009121003**

Surabaya,03 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

**Prof. Akh. Muzaki, Grad. Dip . SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D**

**NIP. 197402091998031002**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sari Bella Putri Santosa
NIM : I71216052
Fakultas/Jurusan : FISIP/ ILMU POLITIK
E-mail address : Saribella1307@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian,Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Sari Bella)

*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

**Sari Bella Putri Santosa,2020. "**Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)".

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi hingga tingkat Desa, berhasilnya pembangunan di desa merupakan cermin dari seorang pemimpin Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur Desa sidomulyo. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur pada tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di Sidomulyo. Segala kegiatan Desa Sidomulyo telah melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi perencanaan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa masih terbilang sangat minim. Perealisasian pembangunan di Desa juga di anggap belum merata di setiap dusunnya.

Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur desa menggunakan strategi yang sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 yaitu Strategi Perencanaan, Strategi Pelaksanaan, Serta Strategi Pengawasan. Arah kebijakan Desa untuk Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan , jembatan, serta jalan infrastruktur strategis lainnya. Dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung kebijakan ini adalah sumber daya manusia/ masyarakat, faktor dana, akses sekolah, kemauan yang kuat dari masyarakat, dan seringnya banjir saat air sungai meluap. Sedangkan faktor penghambat kebijakan nya dari tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, budaya patrenalistik, serta penghambatan pada saat proses pembangunan infrastruktur/fisik desa.

**Kata Kunci :** *Strategi, Infrastruktur, Pembangunan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i
LEMBAR PENGESAHAN ……...ii
MOTTO.....iii
PERSEMBAHAN.....iv
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TABEL.....xiii
DAFTAR BAGAN.....xiv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan Penelitian.....10
D. Manfaat Penelitian.....11
a. Manfaat Teoritis.....11
b. Manfaat Praktis.....11
c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....11
E. Definisi Konseptual.....12
BAB II KAJIAN TEORI.....19
A. Penelitian Terdahulu.....19
B. Kajian Pustaka.....30
C. Kerangka Teori.....45
1. Teori implementasi kebijakan.....45
a. Teori George C.Edwards III (1980).....45
b. Teori Merillee S.Grindle (1980).....46
c. Teori Daniel A. Mazmania dan Paul A.Sabaiter (1983).....47
2. Teori Kebijakan Publik.....47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN.....51

A. Jenis Penelitian.....51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....52
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....52
D. Tahap-tahap Penelitian.....54
E. Teknik Pengumpulan Data.....56
F. Teknik Analisis Data.....58
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....60
H. Sistematika Pembahasan.....63

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....63

A. Setting Penelitian.....63
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....63
a. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo.....63
b. Demografi Kabupaten Sidoarjo.....66
c. Aspek Ekonomi.....67
d. Aspek Keagamaan.....68
e. Aspek Pendidikan.....69
f. Visi Misi.....71
2. Gambaran Umum Kecamatan Krian.....72
a. Sumber Letak Wilayah Kecamatan Krian.....72
b. Letak Geografi.....73
3. Gambaran Umum Desa Sidomulyo.....75
a. Letak Geografis.....76
b. Kondisi Demografis.....77
c. Tingkat pendidikan.....79
d. Kondisi Perekonomian.....80
e. Kondisi Agama dan Kebudayaan.....80
f. Visi & Misi.....100
4. Realisasi Pembangunan Desa Sidomulyo……106
a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa.....106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembangunan dan perbaikan selokan / Drainase.....106
c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengurusan Jalan Lingkungan Umum.....107
d. Perawatan Mushola dan masjid wakof sewilayah desa Sidomulyo……107
5. Proses Penyusunan APBDes Desa Sidomulyo.....107
B. Data Fokus Penelitian.....109
1. Pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo.....109
2. Hasil Pembahasan Data.....118
C. Analisa Data dan Pembahasan.....128
1. Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.....128
1. Strategi Perencanaan .....131
2. Strategi Pelaksanaan.....136
3. Strategi Pengawasan.....138
➢ Proses Penyusunan Anggaran APBDes desa Sidomulyo.....140
➢ Proses pengelolaan APBDes pembangunan Infrastruktur desa Sidomulyo.....141
1. Pelaksanaan.....142
2. Pelaporan.....143
3. Pertanggungjawaban.....146
➢ Bentuk Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes )tentang pembangunan di Desa Sidomulyo.....147
➢ Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di Desa Sidomulyo.....149
2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur desa Sidomulyo, Kecamatan Krian,Kabupaten Sidoarjo.....151
a. Faktor Pendukung.....151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber daya manusia/masyarakat.....152
2. Faktor dana…….....……..153
3. Akses Sekolah.....153
4. Kemauan Yang Kuat Dari Masyarakat.....155
5. Seringnya banjir saat air sungai meluap.....158
b. Faktor Penghambat.....159
1. Tingkat Pendidikan……..……..……...……160
2. Partisipasi masyarakat.....161
3. Budaya Patrenalistik.....161
4. Penghambatan Pada Proses Pembangunan.....162
D. Temuan Hasil Penelitian.....164

BAB V PENUTUP.....167

A. Kesimpulan.....167
B. Saran.....179
1. Saran Kepada Pemerintah Desa.....179
2. Saran Kepada Masyarakat Desa.....179

DAFTAR PUSTAKA.....180

LAMPIRAN.....183

a. Transkip Wawancara.....183
b. Dokumentasi.....195
c. Hasil Turnitin.....200
d. Surat Perijinan Turun Lapangan.....201
e. Biodata Penulis.....204
f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL :

3.1 Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

3.2 Daftar nama informan

3.3 Teknis analisis data Miles dan Huberman

4.1 Jumlah kecamatan di Sidoarjo

4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo

4.3 Jumlah Penduduk menurut pendidikan kabupaten sidoarjo

4.4 Nama-nama desa di Kecamatan Krian

4.5 Jumlah Kependudukan Desa Sidomulyo

4.6 Jumlah kependudukan usia produktif dan Non produktif Desa Sidomulyo

4.7 Nama Pejabat Pemerintah Desa Sidomulyo

4.8 Realisasi Pembangunan Infrastruktur Fisik Tahun 2019 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

4.9 Bentuk Realisasi RPJMDes Desa Sidomulyo

4.10 Daftar Tabel APBDes Desa Sidomulyo

4.11 Daftar Temuan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR BAGAN

2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan

4.1 Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi . Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai penggerak pembangunan di suatu kawasan . Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan sebuah bangsa dan negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun peningkatan kapasitas fasilitas yang rusak, serta pembangunan yang rusak. Pemerintah senantiasa memberikan prioritas bagi pembangunan yang berfungsinya infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.[1]

Pembangunan fisik atau pembangunan yang bisa di ukur seperti pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan pelayanan sosial serta kegiatan sosial kemasyrakatan dan meningkatkan aksebelitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedasaan adalah

[1] Abdul Haris, Kasubdit Pertanahan "direktorat tata ruang dam pertanahan", Bappenas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagunan jembatan, pengaspalan/pavingisasi jalan, sarana air bersih dan lainnya. Pembangunan dilaksanakan untuk mempermudah hidup masyarakat sehingga tidak cenderung bergantung pada satu aspek saja. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah serta mendorong perkembangan ekonomi wilayah dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Masyarakatnya mayoritas beragama islam dan bermata pencarian sebagian besar sebagai petani. Desa Sidomulyo memiliki Empat (4) Dusun yaitu Dusun Patuk Pulo, Dusun Sidotemu, Dusun Jrebeng, dan Dusun Patuk Sidomulyo. Dari Keempat (4) Dusun tersebut terdapat Satu (1) dusun yang kurang mendapatkan Fasilitas Pembangunan infrastruktur yaitu pada pembangunan Pavingisasi dan perbaikan gorong-gorong tepatnya di Dusun Patuk Pulo. Tetapi dari sekian tahun masyarakat dusun patuk pulo ini baru merasakan Pembagunan prasarana jembatan dikampung ini sudah diresmikan dari tahun 2017 sebagai media penghubung antara Dusun patuk pulo dengan patuk sidomulyo oleh pemerintah desa sidomulyo yang di bantu dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Dana Anggaran Pendaapatan dan Belanja desa (APBDes). Pada akhirnya seluruh aktivitas masyarakat dapat dilaksakan dengan lebih cepat, efisien dan bermanfaat. Dampak pembangunan jembatan gantung warna-warni penghubung Dusun patuk sidomulyo dan Dusun patuk pulo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa sidomulyo, Kecamatan krian, Kabupaten sidoarjo, akan menjadi wahana baru di desa patuk Kecamatan krian. Jembatan ini diresmikan oleh bupati sidoarjo Saiful Ilah itu memiliki daya warna yang kuat dari ujung hingga keujung. Oleh karena itu dampak pelayanan dari kebijakan publiknya lebih kepada meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan pembangunan jembatan itu sebagai penghubung Dusun patuk sidomulyo dan Dusun patuk pulo, Desa Sidomulyo, Kecamatan krian, Kabupaten sidoarjo yang terpisah dengan sungai ini juga memiliki nilai jual selfi. Padahal, sebelumnya untuk mencapai satu dusun kedusun lainnya ini, warga menggunakan perahu tambang yang bisa mengancam keselamatan para pengguna perahu tambang tradisional itu. Kini dengan adanya jembatan gantung yang dibangun dengan panjang 64m dan lebar 2m itu akan menjadi destinasi wisata baru serta bisa meningkatkan sosial ekonomi didesa.

Dampak yang dapat dirasakan dari kebijakan beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun di Desa Sidomulyo seperti pembangunan gorong-gorong dan perbaikan jalan desa serta pembangunan berupa jembatan didesa Sidomulyo yaitu lebih mempermudah aktivitas warga serta mendorong sektor perekonomian warga di dua dusun dikarenakan masyarakat sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam pendistribusian barang dagangan mereka, serta lebih meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan antar dua dusun. Serta pembangunan Selokan yang dilakukan disetiap dusun agar masyarakat tidak lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kebanjiran saat hujan turun berhari-hari. Akan tetapi berbeda yang dirasakan oleh Dusun Patuk pulo jika hujan turun berhari-hari masyarakat dusun patuk pulo masih merasakan kebanjiran dikarenakan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman dusun tersebut, walaupun pemerintah desa sidomulyo sudah memperbaiki resapan air di desa tersebut masih kurang optimal hasilnya dikarenakan dusun tersebut dikelilingi oleh pabrik dan pemerintah Desa Sidomulyo belum menemukan solusi untuk masalah yang di hadapi salah satu dusunnya. Pembangunan yang telah dilakukan selama ini secara umum juga telah memberikan manfaat dalam pembangunan daerah dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat secara umum.[2]

Untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan infrastruktur yang berkualitas pemerintah telah memberikan usaha baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan pelayanan infrastruktur yang rusak dan meningkatkan pelayanan serta pembangunan baru.[3] Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan. Maka untuk tercapainya keberhasilan pembangunan , segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakatnya. Karena mereka yang tahu bagaimana keadaan geografis

[2] Une bangun sihombing, "Analisis Dampak Pembangunan Jembatan Tapian Nauli Desa Gempolan Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai " Jurnal Ekonom , Vol 19,N0 1, Januari 2016. Hlm 37

[3] Yuanita Berlin, irwan noor, siswidiyanto, "pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada lokasi dampak semburan lumpur lapindo kecamatan porong kabupaten sidoarjo" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, No. 1, Hal 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

,permasalahan , dan kebutuhan untuk pembangunan wilayahnya sebab merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan akan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka nantinya. Sebelum adanya pembangunan harus ada perencanaan yang matang untuk syarat adanya pembangunan yang baik. Tetapi belum tentu juga adanya perencanaan yang matang belum tentu adanya pembangunan yang sukses apabila dalam kegiatannya masih ada hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan.

Pembangunan menurut Sondang P.Siagian dalam Yuanita dkk adalah suatau usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah menuju pembangunan modern. Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofadidjaja berpendapat bahwa pembangunan yaitu suatu upaya masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih baik, maju dan baik, sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu.[4]

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanann otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberi peluang dan memberi kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di

[4] Sondang P.Siagian dalam Yuanita dkk, tentang Pembangunan Infrastruktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Menurut undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewnang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usal-usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggualangan kesmiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan Prasaranan Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.[6]

Berlakunya undang-undang Desa No 6 Tahun 2014, membawa berbagai implikasi. Terdapat perubahan penting bagi desa atau kelurahan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Desa (UU No 6 Th 2014) antara lain ;

[5] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014), Pasal 1 Ayat (1), Diakses 29 Oktober 2019 jam 15.58
[6] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78 ayat 1 dan 2 )

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Desa atau kelurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa yakni
   1) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam (6) tahun
   2) Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu satu (1) Tahun.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten.
c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes)
d. Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masayarakat desa sebagaimana ditetapkan pada UU No 6 Th 2014
e. Orientasi atau tujaun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan pada pasal 78. UU No 6 Tahun 2014 yakni :
   1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meningkatkan Kualitas hidup
3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
4. Pembangunan sarana dan prasarana desa
5. Pengembangan ekonomi lokal
6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[7]

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan masih adanya kesenjangan, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih jauh dari harapan. Seharusnya sudah dua dasa warsa otonomi daerah tersebut sudah membawa perubahan yang signifikan, tetapi faktanya keadaan infrastruktur merupakan determinan penting untuk percepatan pembangunan daerah. Mengapa penelitian ini menarik bagi penulis, alasan pertama dikarenakan menurut penulis Desa Sidomulyo ini dari beberapa dusun yang ada di Desa Sidomulyo yaitu Dusun Patuk Pulo, Dusun Jrebeng, Dusun Patuk Sidomulyo, dan Dusun Sidotemu ada satu (1) dusun yang memiliki kesenjangan yaitu Dusun Patuk Pulo diakibatkan Pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Dusun Patuk Sidomulyo merupakan dusun yang masyarakatnya lebih terjangkau dari segi fasilitas dan transportasi serta masyarakatnya lebih banyak, Dusun Jrebeng Juga fasilitasnya terpenuhi dikarenakan Dusun ini berdekatan dengan Balai

[7] Deky Aji Suseno, "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" Jurnal STIE Semarang, Vol 8, No 2, edisi Juni 2016 (2252-826) Hlm 122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sidomulyo, Dusun Sidotemu merupakan dusun yang paling strategis dan fasilitasnya sangat baik dikarenakan dusun sidotemu merupakan akses pintu masuk utama untuk menuju Desa Sidomulyo, sedangkan Dusun Patuk Pulo masyarakatnya lebih sedikit dari dusun-dusun yang ada Desa Sidomulyo serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Ketika pada tahun 2017 Desa Sidomulyo mulai memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya yaitu fasilitas jembatan penghubung, tetapi di dalam dusun Patuk Pulo masih banyak terlihat jalan paving yang rusak. Alasan kedua, dari segi pembangunan infrastrukturnya Desa Sidomulyo Kurang adanya pemerataan dalam pembangunan Pavingisasi yaitu di Dusun Patuk Pulo Serta jika air sungai meluap didesa patuk pulo sering terjadi kebanjiran akibat luapan air sungai dikarenakan luapan air sungai dan resapan air yang tidak berfungsi optimal.

Pentingnya pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksebilitas bidang ekonomi, sosial budaya tetapi juga dapat menunjang kelancaaran aktivitas warga dan juga dapat mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Mengingat pembangunan infrastruktur kurang optimal maka kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintah kurang efektif. Diharapkan dari adanya pembangunan tersebut dapat memperlancar kegiatan masyarakat berbagai hal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Berdasarkaan pernyataan masalah diatas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam, mengingat pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Desa Sidomulyo belum sepenuhnya menyentuh hati nurani dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkkan dapat mengungkap permasalahan yang terjadi sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai problem statement yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini dapat diharapkan manfaat sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan secara teoritis sebagai tambahan referensi dalam mata kuliah kebijakan publik.
2. Menambah pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Strategi dan Kebijakan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.

### b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Peran dan Strategi Desa dalam Pembangunan Infrastruktur
2. Penelitian ini dapat membuka wawasan bagi peneliti dan masyarakat tentang Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

### c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Definisi Konseptual

### a. Definisi Strategi

1. Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Menurut David Strategi adalah saranan bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.[8]
2. Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.[9]
3. Menurut Pearce II dan Robinson strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.[10]

### b. Definisi Implementasi

1. Menurut Nurdin Usman Implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan, yang artinya dilaksanakan dan diterapkan adalah

[8] Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, hlm 2
[9] Husein Umar, "Desain Penelitian Manajemen Strategik", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 16
[10] Ibid. hlm 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.[11]

2. Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.[12]
3. Menurut Hanifah implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.[13]

**c. Definisi Kebijakan**

1. Kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi,keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan demikian kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok yang memuat serangkaian program/aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.[14]

---

[11] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo,Jakarta,2002. Hlm 70
[12] Guntur Setiawan,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka,Jakarta,2004. Hlm 39
[13] Budi Winarno, Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi),2007,yogyakarta,Media Pressindo. Hlm 12
[14] Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik" Jurnal Publik Vol.11:No.01;2017, ISSN:1412-7083.Hlm 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Irfan Islamy kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.[15]
3. Menurut Nugroho kebijakan merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan, kebijakan juga sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.[16]

**d. Definisi Implementasi Kebijakan**

1. Van Meter dan Van Horn dalam winarno mendefinisikan implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.[17]

[15] M.Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2007. Hlm 15
[16] William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2000. Hlm 21
[17] Budi Winarno , Teori dan Proses Kebijakan. Hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mazmania dan Sabatier dalam wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.[18]
3. Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu :
   a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
   b. Melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

**e. Definisi Pembangunan**

1. Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan atau suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara kesesluruhan menuju kehidupan yang lebih maju. Pembangunan sendiri juga dapat diartikan sebagai usaha tau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa. Pengertian tersebut memilii arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana.

[18] Wiliam N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,2000) Hlm 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan jalannya pelaksanaan pembangunan. Tahapan yang paling awal dan yang paling penting adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan yang awal , tahap perencanaan akan akan menjadi acuan dasar bagi pelaksaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat matang dan terperinci atau disebut implementatif.[19] Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perencanaan pembangunan dalah dalam undang-undang diartikan sebagai suatu proses yang menentukan tindakan masa depan yang tepat.[20]

2. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.[21]
3. Pembangunan adalah sebuah peran yang cukup penting dalam projek karena untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.[22]

[19] Alimas Jonsa, Samsiar, "Peran Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Ppembangunan Jangka menengah Tahun 2012-2017" Jurnal Muqoddimah Vol. 02, Nomor 1, Desember 2017. Hlm 1-2
[20] Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
[21] Wahyujudin, dalam Nurman,Strategi Pembangunan Daerah,Jakarta,PT. Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015. Hlm 266
[22] Ibid. hlm 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**f. Definisi Infrastruktur**

1. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dalam hal-hal ini hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Infrastruktur merupakan wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Adanya infrastruktur memberikan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi.[23]
2. Menurut suryono pembangunan Infrastruktur dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan.[24]
3. Usman juga berpendapat secara umum bahwa infrastruktur dapat didefinisikan sebagai prasaranan dasar bagi kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang disediakan untuk masyarakat.[25]

---

[23] Cut nanda keusuma dan Suriani, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan Vol.04 , Nomor 1, Mei 2015, ISSN. 2302-8408. Hlm 3-4

[24] Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiono, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)"Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5. Hlm 802

[25] Ibid. hlm 802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**g. Definisi Desa**

1. Menurut H.A.W Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.[26]
2. Menurut R.Binarto desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa atau merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.[27]
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[28]

[26] Prof.Drs. Widjaja, HAW. "Pemerintahan Desa/Marga" PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta,2003. Hlm 3
[27] R.Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
[28] Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan mengenai Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Penelitian Terdahulu

**Tabel 3.1**

**Daftar Tabel Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| **1.** | Andi Asnudin | Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro (SMARTek), Vol.7, No.4, November 2019.[29] | Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam Proses Program pembangunan infrastruktur pedesaan (ppip) tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada |

[29] `Andi Asnudin, "Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat" Jurnaal SMARTek, Vol.7, No.4, November 2009: hlm 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kegiatan-kegiatan serupa yang akan mendatang. |
| **2.** | Endah Puji Lestari,Riyanto, Romula Adiono | Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro),Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3,No.5 2010.[30] | Dalam penelitian ini kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan pada pavingisasi jalan desa dilaksanakan untuk mengatasi tanah labil di kecamatan dander sehingga jalan yang sudah dibangun dapat bertahan lama. Pada sistem ini, pelaksanaan kegiatan kontruksi dilaksanakan mulai tahun 2009 dikerjakan oleh penyedia jasa kontruksi melalui sistem pengadaan jasa sementara kegiatan |

[30] Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiono. "Impelementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.5, Hlm 800

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pemeliharaan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. |
| **3.** | Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji | Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.25,No.2,hlm.137-156,Agustus, 0853-9847 SAPPK ITB 2014.[31] | Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak |

[31] Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji, "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman" Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.25, No.2 Agustus 2014. Hlm 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PPIP yang telah dipilih masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| **4.** | Ravi Kanbur and Ganesh Rauniyar | Conceptualizing inclusive development: with applications to Rural insfrastructure and development assistance, Journal International Mandaluyong city 1550 metro manila, Philippines December 2009.[32] | Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi program pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan atau tidak optimal karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan |

[32] Ravi kanbur and Ganesh Rauniyar, Conceptualizing inclusive development: with applications to Rural insfrastructure and development assistance, Mandaluyong city 1550 metro manila''. Jurnal Pembangunan December 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | infrastruktur dalam bidang jalanan yang masih tidak terlihat perubahan. |
| **5.** | Ross D Collins, Noelle E Selin, Oliver L De Weck, and William C Clark | Application to electricity infrastructure planning in oil-exporting countries, Ecological Economics 133, 23-34, Journal International Digital Accsess to Scholarship at Harvard, j.ecolins.2017 | Dalam penelitian ini Proram pembangunan infrastruktur program pemerintahan dari kementerian pekerjaan umum melaalui direktorat jendral cipta karya yang berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa sebagai upaya |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | meningkatkan kualitas hidup masyarakat. |
| **6.** | Agustine | Study of phsycal insfrastructure development,e-Journal internasional. J.ecolecon.2017.11.013.2017 | Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kondisi jalan yang ada di dalam dusun yang sebagian besar merupakan tanah biasa. Pembangunan ini dilakukan untuk keadilan masyakat serta pemerataan kesejahteraan material dan spriritual. Pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa kesediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonominya. |
| **7.** | Pravakar sahoo and Ranjan Kumar Dash | Infrastructure development and economic growth in india, Journal International of the asia pacific Economy Volume 14. 2009 | Berdasarkan temuan penelitian tampak bahwa masalah pembangunan utama di beberapa wilayah ialah masalah infrastruktur hal-hal fisik. Memperhatikan proporsi usulan kegiatan pembangunan di setiap daerah. Memperlihatkan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam daftar skala prioritas tampak bahwa program pembangunan infrastruktur memanglah penting untuk kebutuhan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | masyarakat. |
| **8.** | M.M.Kumaraswamy,2001 | Governmental role BOT-Led infrastructure development, internasional Journal of Project Management 19, 2001 195-205.2014 | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi di 26 provinsi dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2004-2009. Penelitian ini menunjukkan variabel listrik dijalan memiliki efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. |
| **9.** | Ambia arma, 2017 | Insfrastructure Budget ang Poverty Reduction in Indonesia 2016, advances in Social Science, education and humanities Reseacrh (ASSEHR) Journal International Volume | Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya yaitu tahun 2015 indonesia telah meningkatkan anggaran |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 141 Internatioanl Conference on Public Policy. 2017 | infrastruktur anggaran tinggi infrastruktur pembangunan telah menjadi salah satu prioritas utama yang dimiliki dan telah diatur oleh kebijkan jokowi yang disebut Nawacita dengan tujuan mengurangi kemiskinan di indonesia. Pembangunan tersebut seperti pembangunan jalan, sanitasi, akses air bersih, jembatan, dan bahkan akses ke infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perumahan pemukiman yang dapat mengurangi kemiskinan. |
| **10.** | Juan david Gonzal | Financial Eco-Innovation as a | Jurnal ini bertujuan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mechanism for fostering the development of sustainable insfrastructure system. Journal International Sustainability 2018 MDPI 10, 4463/ su10124463.2018 | untuk mengusulkan kerangka kerja keuangan berdasarkan utang jenis mezzanisme membiayai sistem infrastruktur, dalam analisis jurnal ini menggambarkan inovasi keuangan secara berkelanjutan. Disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diambil manfaatnya dengan memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana jenis utang mezzanine. |
| **11.** | Collins Ross D | Using insclusive wealth for policy evaluation : application to electricity insfrastructure planning in oil- Exporting Countries, Journal International Digital access to Scholarship at | Pembuat keputusan sering berupaya merancang kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Evaluasi |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Harvard, doi/;10.1016/j.ecolecon.2016.11.013 | tentang seberapa efektif kebijakan tersebut cenderung memenuhi tujuan keberlanjutan miliki namun tetap relatif menantang. Mengevaluasi kebijakan terhadap tujuan keberlanjutan dapat difasilitasi melalui kerangka kekayaan inklusif yang mencirikan pembangunan dalam istilah dari masyarakat aset modal yang mendasarinya. |

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah faktor utama untuk kemajuan sebuah daerah atau Desa. Jika pembangunan yang dilakukan desa bisa merata maka desa atau daerah tersebut sudah baik dalam sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pembangunan yang merata dapat dikatakan pemerintah daerahnya sangat memperhatikan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disekitarnya. Pembangunan infrastruktur juga salah satu faktor penting dalam kemajuan sebuah program yang dilakukan pemerintah desa ataupun daerah.

Berdasarkan beberapa sumber dari penelitian terdahulu, bahwa penelitian dalam skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul *"Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)".* Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini akan meneliti bagaimana Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, di desa sidomulyo, kecamatan krian, kabupaten sidoarjo. Kemudian peneliti nantinya akan membahas tentang 1. Bagaimana strategi kebijakan dalam pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, 2. Apa saja faktor pendukung dan Faktor penghambat pada strategi kebijakan dalam pembangunan infrastuktur desa tersebut.Untuk menghindari adanya kesamaan dalam obyek penelitian, maka peneliti memaparkan hasil karya penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan hampir sama dengan apa yang akan diteliti nantinya yaitu mengenai Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan Psikologi. Definisi kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh ysng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan , nilai-nilai, dan praktik-praktiktertentu. Senada dengan definisi dari George C Edward III dalam Suwitri mendefinisikan kebijakan publik sebagai "suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan". Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci "tujuan", "nilai-nilai", dan "praktik".[33]

Menurut Thomas R Dye dalam Howlett dan Ramesh, kebijakan publik adalah " segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan pemberdayaan yang dihasilkan". Dalam pemahaman bahwa "keputusan" termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk "tidak memutuskan" atau memutuskan untuk "tidak mengurus" suatu isu, maka pemahaman ini juga menunjuk pada defisini Thomas R dye dalam Tilaar dan Nugroho yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan "segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah". Senada dengan definisi Dye, George C Edwards III dalam Suwitri juga menyatakan kebijakan publik merupakan :

"apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah

[33] Samodra Wibawa, "evaluasi kebijakan publik). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994. Hlm 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah".[34]

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment.*

*Bagan 2.1*

*Tiga elemen sistem kebijakan*

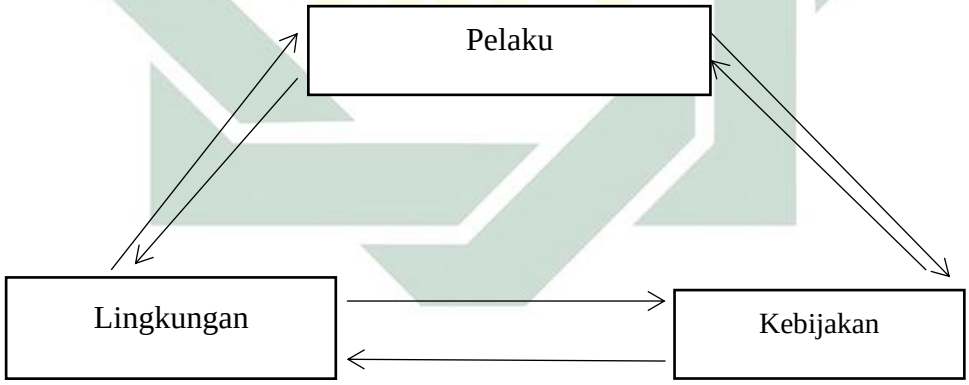


Sumber : Thomas R Dye dalam Dunn (2000:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan

[34] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan, "Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya".

**2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya,tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu ada dua langkah pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu mulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan dan kemudian menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. [35]

Banyaknya pengertian implementasi kebijakan ditengahkan oleh para ahli sangat bervariasi. Van meter, Dinald dan Van horn, Carl e merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat

[35] Samodra Wibawa, "evaluasi kebijakan publik). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994. Hlm 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah maupun swasta diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier memeberikan penjelasan mengenai implementasi tersebut sebagai berikut :

> "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"

Implementasi kebijakan harus di wujudkan dalam bentuk program-program yang lebih rinci, seperti yang dikemukakan Grindle bahwa :

> "proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program – program telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan sasaran tersebut".[36]

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.[37]

### 3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

[36] ibid
[37] Merielle S.Grindle, "Politics and Apolicy Imlementation in the world" New Jersey:Princetown University Press.1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mastarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial,ekonomi,akses, pasar, dan politik ) harus melihat keterkaitan antar desa antar kecamatan dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Pembangunn desa dan infrastruktur desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa . dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.[38]

Adanya sebuah pembangunan desa ataupun perbaikan infrastruktur desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasioanl. Pembangunan desa ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik saja namun pembangunan nonfisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor dari sumber manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pemangunan didesa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa.[39] Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang

[38] Wahjudin , dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta,PT.RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1 , 2015. Hlm 266-267
[39] Adisasmita , Rahardjo, Pembangunan pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta Graha Ilmu, 2006. Hlm 03

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa yang dilaksanakan secara sistematis , konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi , dan pendampingan. Di dalam penelitian ini terdapat APBDes dari desa dan terperinci mengenai dana desa sehingga peneliti ingin memberikan dasar hukum tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

a. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pembangunan Desa

Pasal 5

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

a. Perencanaan Pembangunan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pengawasan Pembangunan Desa; dan

d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

(2) Penetapan daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

(3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:

a. perangkat daerah kabupaten/kota;

b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d. pihak lainnya.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(6) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antarDesa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan; dan

b. pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 50

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:

a. penetapan Pelaksana Kegiatan;

b. penyusunan rencana kerja;

c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;

d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan

kegiatan;

f. penyiapan dokumen administrasi;

g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;

h. pengadaan tenaga kerja; dan

i. pengadaan bahan/material.

Paragraf 1

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 51

(1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(3) Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

b. Perturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pada Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjelaskan bahwa :

Pasal 78

(1) Pembanguna desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan.

(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadialn sosial.[40]

[40] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 79

Perencanaan

(1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunsecara berjangka meliputi :

a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desaa untuk jangka waktu 6 tahun

b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan didesa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Program Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanannya kepada desa.

(7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

(1) Perencanaan pembangunan desa sebaagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas , program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau/ anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan atau kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi , dan,

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 81

Pelaksanaan

(1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

(3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan lokal brskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa diinformasikan kapada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Pasal 82

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

(1) Masyarakat desa berhaak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembanguna desa.

(3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembanguna desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan musyawarah desa.

(4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , Rencana Kerjaa Pemerintah Desa , dan anggaran pendapatan dan Belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.[41]

## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

#### a. Teori George C.Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi Sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi pemutar balikan fakta implementasi.

2) Sumberdaya

[41] Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan kawasan Pedesaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementassi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

3) Disposisi

Dispoisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti : komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugass mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

**b. Teori Merillee S.Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi menurut Merillee S.Grindle di pengaruhi oleh dua variabel besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan mencakup :

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
b. Derajat perubahan yang inginkan.
c. Kedudukan pembuatan kebijakan.
d. Siapa pelaksana program.
e. Sumber daya yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan variabel lingkungan implementasinya mencakup :

a. Kekuasaan , kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
c. Kepatuhan dan daya tanggap.

**c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabaitier (1983)**

Berpendapat ada 3 (tiga) kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan undang-undang, dan variabel lingkungan.[42]

**2. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan (Policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengolahan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolahan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.[43]

**Thomas R.Dye dalam Sahya** mengatakan bahwa " public policy is whatever goverments choose to do not to do" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik

[42] Budi Winarno, Kebijakan Publik – Teori dan Proses, (Jakarta: PT.Buku Kita,2008).hlm 146-147
[43] Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: CV Alfabeta, 2008). Hlm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.[44]

**James Anderson dalam Solichin Abdul Wahab** "publik policy are those policies developed by governmental bodies and officials" (Kebijakan publik adalah kebijakan yaang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Sedangkan menurut David Easton (Kebijakan publik adalah pengaplikasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masayarakat).[45]

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

a. Formulasi masalah (Problem Formulation)

   Apa masalahnya ? apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan ? bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah ?

b. Formulasi Kebijakan (formulation)

   Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut ? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?

c. Penentuan Kebijakan (Adoption)

   Bagaimana alternatif ditetapkan ? persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi ? siapa yang akan

[44] Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm 35
[45] Solichin Abdul Wahab, "Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi Kebijakan Publik" (Jakarta: Bumi Aksara,2015). Hlm 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan kebijakan ? apa isis kebijakan yang telah ditetapkan ?

d. Implementasi (Implementation)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan ? apa yang mereka kerjakan ? apa dampak dari isi kebijakan ?

e. Evaluasi (evaluation)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur ? siaapa yang mengevaluasi kebijakan ? apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan ? adakan tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan ?

Sedangkan Mochael Howlet dan M.Ramesh (1995) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting), yaitu suatu proses perumusan masalah bisa mendapat perhaatian dari pemerintah.
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
c. Pembuatan kebijakan (decision making), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil kerja atau kinerja kebijakan.

Pada hakikatnya kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.[46]

[46] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.[47]

Metode penelitian Kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif,[48] dan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Patuk Sidomulyo. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data dapat di dapat dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh data yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tahapan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

[47] Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D".(Bandung: Alfabeta,2015). Hlm 246

[48] Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial". Hlm 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian yakni Kepala desa Patuk Sidomulyo informan kunci (Key informan), sedangkan informan pendukungnya yaitu beberapa masyarakat.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dijadwalkan dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 Bulan , yang dimulai pada Februari – April 2020

## C. Pemilihan Subyek Penelitian

### 1. Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi subjek yang memiliki peranan yang strategis. Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono, teknik purposive sampling merupakan teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut melihat seperti orang yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian. Dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa subyek tersebut benar-benar dapat memberi informasi dan menguasai objek yang akan diteliti.

Informan penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya proses pengimplementasian kebijakan pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu informan diperlukan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur desa, meliputi : Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris desa, dan masyarakat dusun patuk dan patuk pulo yang merasakan efektifitasanya pembangunan infrastruktur berupa jembatan di dusun patuk pulo. Menurut penulis subyek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 3.2**

**Daftar Nama Informan**

| | **Nama** | **Pekerjaan** |
|---|---|---|
| **1** | **H.Kunadi.SH** | **Kepala Desa Sidomulyo** |
| **2** | **Andie Dwi H.B** | **Sekretaris Desa Sidomulyo** |
| **3** | **Bapak Suyitno** | **Karyawan Jawa Pos** |
| **4** | **Bu eni** | **Ibu Rumah Tangga** |

**2. Objek Penelitian**

Dalam Penelitian ini objek penelitian meliputi :

a. Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian , Kabupaten Sidoarjo.

**D. Tahap-tahap Penelitian**

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini penulis menggali informasi mengenai Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akses data awal penuls menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap pra lapangan ini adalah:

a. Menyusun rancangan penelitian berupa penyusunan proposal penelitian.
b. Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis melakukan
c. penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
d. Kemudian setelah proposal penelitian dibuat penulis membuat surat pengajuan untuk perijinan kepada Bangkesbangpol selaku institusi yang mengeluarkan perijinan yang selanjutnya akan diajukan ke Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan kelurahan Desa Sidomulyo.

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara mendalam

Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau wawancara secara mendalam dengan informan yang tepat agar memperoleh data yang valid. Informan adalah dari Kepala Desa Sidomulyo beserta Sekretaris Desa dan masyarakat dusun patuk pulo dan patuk sidomulyo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengumpulan Dokumen

Setelah dilakukan interview atau wawancara mendalam, penulis akan mengumpulkan informasi yang telah didapat serta mencocokkannya dengan data yang telah ada dilapangan guna mengkorelasikan beberapa informasi yang dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisis data.

c. Menyusun Laporan

Selanjutnya setelah mendapat informasi dan wawancara dan dilakukan tahapan analisis data, penulis akan segera menyusun laporan yang akan disusun menggunakan format yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data dibuat berdasarkan rancangan penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti karena menjadi pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian. yakni pewawancara (interview) merupakan orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) ialah orang yang memberikan jawab atas pertanyaan yang telah diajukan. Teknik wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan hubungan kontak pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.

Yang menjadi fokus wawancara adalah Kepala Desa Sidomulyo dan juga beberapa masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan. Berdasarkan hal ini maka data-data penelitian akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , serta data dokumentasi lain yang berupa catatan tertulis dari buku penulis serta dari sumber-sumber pendukung lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menurut Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174).[49]

**Tabel 3.3**

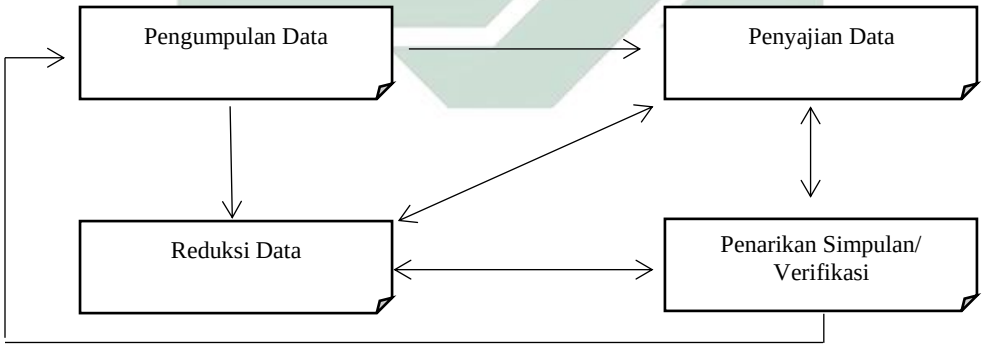


Sumber : Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

[49] Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari teknik analisis ini diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

   Reduksi data menurut Miles dan Huberman ialah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

   Reduksi data dalam penelitian kualitatif akan lebih fokus pada tujuan yang akan dicapai pada temuan. Selain itu penulis juga akan menjelaskan tentang bagaimana strategi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu penulis akan menghimpun analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Implementasi kebijakan tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

   Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai informasi yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan, dan tindakan tertentu. Selanjutnya melalui hal tersebut, akan di dapat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna untuk mempermudah langkah selanjutnya untuk menganalisis atau mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui data penelitian. Sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan, maka penulis akan mendapati penyajian data diantaranya : Gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Krian, serta Desa Sidomulyo.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal masih nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[50]

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Haberman dan Miles. Dalam model ini terdapat 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut:[51]

a) Tahap Pengumpulan Data

[50] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014), Hal. 252
[51] Ibid, hlm 147-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal dengan cara observasi partisipatif. Data yang dikumpulkan dapat berupa data observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan alat berupa kamera atau alat perekam.

b) Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan kegiatan analisis sehingga bagian data mana yang harus diambil atau dibuang. Dalam proses reduksi data ini akan membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan. Hal inilah yang nantinya akan memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah menjadi data yang diperlukan maupun data yang tidak diperlukan.

c) Tahap Display Data

Tahap selanjutnya yaitu tahap display data. Tahapan ini sama halnya dengan tahap penyajian data. Artinya pada tahap ini yaitu setelah melakukan tahap pengumpulan data dan tahap reduksi data, kemudian data-data tersebut disajikan sebagaimana mestinya agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atau peneliti ingin meneruskan analisis dari hasil temuan yang telah didapatkan pada saat observasi lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Tahapan ini merupakan tahapan pengambilan kesimpulan atas hasil final penelitian yang telah dilakukan.

## H. Sistematika Pembahasan

### a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

### b. Bab II Landasan Teori

Memuat uraian tentaang kerangka teori relevan yang digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan tema skripsi.

### c. Bab III Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi, jenis penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis data yang digunakan.

### d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi 1.) Hasil penelitian, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. 2.) pembahasan , dimana sub bahasan 1 dan 2 dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Setting Penelitian

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

#### a. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang di hampit oleh dua sungai yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan sidoarjo dikenal dengan Kota Delta. Kabupaten sidoajo terletak antara 7,3 dan 7,5 Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71,424,5 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri karakteristik yang dimiliki kabupaten sidoarjo terbagi kedalam tiga wilayah, pertama daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak dibagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berasa di posisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak dibagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.

a. Batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo :

Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklim di kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi terjadi di bulan Januari dan hari-hari yang sering terjadi hujan, terjadi di bulan Desember. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada dikabupaten sidoarjo wilayah yang paling luas terdapat dikecamatan Jabon (81,00 KM2) dan Sedati (79,43 KM2). Akan tetapi kedua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di kabupaten Sidoarjo daerhanya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya sama luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61 KM2.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Kecamatan Di Sidoarjo**

| NO | NAMA KECAMATAN | Luas Wilayah |
|---|---|---|
| 1 | Sidoarjo | 62,56 $^{KM2}$ |
| 2 | Buduran | 41,03 $^{KM2}$ |
| 3 | Candi | 40,67 $^{KM2}$ |
| 4 | Porong | 29,82 $^{KM2}$ |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Krembung | 29,55 KM2 |
| 6 | Tulangan | 31,21 KM2 |
| 7 | Tanggulangin | 32,29 KM2 |
| 8 | Jabon | 81,00 KM2 |
| 9 | Krian | 32,50 KM2 |
| 10 | Balongbendo | 31,40 KM2 |
| 11 | Wonoayu | 33,92 KM2 |
| 12 | Tarik | 36,06 KM2 |
| 13 | Prambon | 34,24 KM2 |
| 14 | Taman | 31,54 KM2 |
| 15 | Waru | 30,32 KM2 |
| 16 | Gedangan | 24,06 KM2 |
| 17 | Sedati | 79,43 KM2 |
| 18 | Sukodono | 32,68 KM2.[52] |

Jarak antara Kecamatan adalah Jarak dari Ibu Kota kecamatan ke ibu kota kecamatan lain. Luas daerah suatu kecamatan tidak termasuk hutan negara.

[52] Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketinggian di bagi menjadi 3 bagian yaitu ketinggian 0 sampai kurang dari 500 meter, 500 sampai dengan kurang dari 1000 meter , dan lebih dari 1000 meter.

**b. Demografi Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari kecamatan Sidoarjo dengan jumlah Penduduk 194.051 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki 95.166 jiwa dan perempuan 46.901 jiwa.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo**

| NO | Kecamatan | Laki-laki Jumlah(Jiwa) | Perempuan Jumlah(Jiwa) | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidoarjo | 95.885 | 98.166 | 194.051 |
| 2 | Buduran | 46.901 | 45.433 | 92.334 |
| 3 | Candi | 72.283 | 72.863 | 145.146 |
| 4 | Porong | 33.771 | 32.138 | 69.909 |
| 5 | Krembung | 29.183 | 29.175 | 58.385 |
| 6 | Tulangan | 43.982 | 43.440 | 87.422 |
| 7 | Tanggulangin | 42.279 | 42.301 | 84.580 |
| 8 | Jabon | 24.966 | 25.023 | 49.989 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Krian | 59.899 | 58.786 | 118.685 |
| 10 | Balongbendo | 33.633 | 33.232 | 66.865 |
| 11 | Wonoayu | 36.071 | 35.992 | 72.009 |
| 12 | Tarik | 30.615 | 30.362 | 60.977 |
| 13 | Prambon | 34.273 | 34.063 | 68.336 |
| 14 | Taman | 107.256 | 105.601 | 212.857 |
| 15 | Waru | 116.242 | 115.056 | 231.298 |
| 16 | Gedangan | 67.757 | 65.090 | 132.847 |
| 17 | Sedati | 46.805 | 45.663 | 92.468 |
| 18 | Sukodono | 55.936 | 55.158 | 111.121 |
| | Jumlah | 977.683 | 967.569 | 1.945.252 |

**c. Aspek ekonomi**

Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam kabupaten sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerja swasta. Penduduk kabupaten sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 Jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat sidoarjo adalah sektor jasa.

**d. Aspek keagamaan**

Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara. Keberagaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo tersebar di 18 kecamatan yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di kabupaten Sidoarjo dan Jumlah pemeluknya terdiri dari Pertama, agama islam dengan Jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa.[53]

[53] Profil Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**e. Aspek Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat yang berdomisili di kabupaten sidoarjo setidaknya memiliki enam jenis tingkat pendidikan yakni; masyarakat dengan jenjang pendidikan TK, Masyarakat dengan jenjang pendidikan SD, masyarakat dengan jenjang pendidikan SLTP, masyarakat dengan jenjang pendidikan SLTA, masyarakat dengan jenjang pendidikan akademi, masyarakat dengan jenjang pendidikan Sarjana.

**Tabel 4.3**

**Jumlah penduduk menurut pendidikan Kabupaten Sidoarjo**

| NO | URAIAN | JUMLAH (JIWA) |
|---|---|---|
| 1 | Taman Kanak-kanak (TK) | 451.360 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 441.074 |
| 3 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 326.661 |
| 4 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 586.704 |
| 5 | Akademi | 37.922 |
| 6 | Sarjana | 155.736 |
| | Jumlah | 1.999.457 |

Sumber : DDA Kabupaten Sidoarjo, 2012,104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Enam jenjang pendidikan (TK,SD,SLTP,SLTA,Akademi,Sarjana) yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten sidoarjo yang terdiri dari masyarakat dengan tingkat pendidikan TK berjumlah 451.360 orang, masyarakat yang dengan tingkat pendidikan SD yang berjumlah 441.074, masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTP berjumlah 326.661, masyarakat dengan pendidikan SLTA yang berjumlah 586.704, masyarakat dengan tingkat pendidikan Akademi berjumlah 37.922, masyarakat dengan tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 155.736.

Masing-masing tingkat pendidikan berikut jumlahnya, apabila kita lakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah penduduk yang dimiliki tingkat pendidikan tersebut. Peringkat pertama dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SLTA , peringkat kedua dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan TK, peringkat ketiga dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SD, peringkat keempat dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SLTP, peringkat kelima dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan Sarjana, dan peringkat keenam dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan Akademi.

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang dimiliki oleh daerah, sehingga dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dimungkinkan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, disisi lain adanya tempat pendidikan sebagai fasilitas penunjang untuk kegiatas belajar mengajar penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan. Ketersebaran fasilitas pendidikan ditiap-tiap jenjang memungkinkan masyarakat agar mudah untuk menjangkau. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan masyarakat bisa meningkat.[54]

**Visi dan Misi**

**VISI :** Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan

**MISI :**

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
2. Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas dan standart pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah, berlandaskan keimanan kepada tuhan yang maha esa , serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

[54] Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2009,34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Krian

Kantor Kecamatan Kkian Sidoarjo merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Gubernur Sunandar P. Kantor Kecamatan Krian berdiri pada Tahun 1967 dengan Bpak R.Ismangoen Camat Krian yang pertama kali. Luas wilayah kecamatan Sidoarjo seluas 3.008 Hektar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kantor kecamatan sidoarjo sehari-hari memiliki pegawai sebanyak 21 orang yang terbagi dalam berbagai bagian antaran lain : Camat, Sekretaris Camat, Seksi Ketentraman dan Ktertiban, Seksi Perekonomian dan pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan seksi pemerintahan.

### a. Sumber Letak Wilayah Kecamatan Krian Sidoarjo berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gresik Sebelah Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Taman dan Sukodono

Sebelah Selatan : Kecamatan Wonoayu dan Kecamatan Prambon adapun wilayah Kecamatan Krian terbagi dalam 5 kelurahan dan 14 desa yaitu , 1.kelurahan krian, 2. Kelurahan tambak,3. Kelurahan kemasan,4.Kelurahan mijen, 5. Kelurahan watu Golong. Sedangkan 14 desa yaitu : barengkrajan, gamping, katerungan, kraton, ponokawan, sidomojo, sidomulyo, dan keboharan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**b. Letak Geografis**

Kecamatan krian terletak di 20 km sebelah barat daya Surabaya. Secara geografis kecamatan ini berada dilokasi yang strategis, karena terletak di antara 4 ibu kota kabupaten/ kotamadya yaitu surabaya (timur), Sidoarjo (selatan), Gresik (Utara), dan Mojokerton (Barat). Lokasi Krian juga sangat strategis dari sisi transportasi karena merupakan salah satu jalur transportasi utama (jalan Negara) dari surabaya – jakarta melalui jalur selatan (Surabaya – madiun – Solo – Semarang/jogja – Bandung-Jakarta). Dengan lokasi strategis yang memberikan banyak keuntungan bagi krian terutama dalam segi ekonomi karena sebagai salah satu kawasan satelit bagi surabaya. Banyak sekali perusahaan yang berdiri dilokasi krian sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat.[55]

**Tabel 4.4**

**Nama-nama desa kecamatan Krian**

| No | Nama – nama Desa Kecamatan Krian |
|---|---|
| 1 | Desa Barengkrajan |
| 2 | Desa Gamping |
| 3 | Desa Jatikalang |
| 4 | Desa Junwangi |

[55] Profil kecamatan Krian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| 5 | Desa Katerungan |
| 6 | Desa Keboharan |
| 7 | Desa Kraton |
| 8 | Desa Ponokawan |
| 9 | Desa Sedengan Mijen |
| 10 | Desa Sidomojo |
| 11 | Desa Sidomulyo |
| 12 | Desa Sidorejo |
| 13 | Desa Tempel |
| 14 | Desa Terik |
| 15 | Desa Terungkulon |
| 16 | Desa Terungwetan |
| 17 | Desa Tropodo |
| 18 | Desa Watugolong |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Gambaran Umum Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Desa Patuk Sidomulyo Terletak kurang lebih 17 kilometer dari pusat kota Kabupaten Sidoarjo dan jarak dari pusat

kota kecamatan kurang lebih 5 kilometer. Desa ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum dan bus kota karena jarak dengan Jalan Raya sangat dekat. Akses Desa Patuk Sangat dekat dengan Jalan Raya By Pass Jalan Raya besar yang dilewati bus-bus kota arah Mojokerto, Jombang, Kediri, dan Madiun.

Sejarah Desa Sidomulyo berasal dari beberapa penggalan cerita yang unik dari nenek moyang dan konon katanya kenapa dinamakan Desa Patuk Sidomulyo karena jaman dahulu masyarakatnya dilarang memiliki pasangan atau menikah dengan orang luar desa atau harus menikah dengan orang desa patuk sidomulyo sendiri dari kata patuk sendiri yaitu dalam bahasa jawanya kepetuk artinya yaitu bertemu jadi seringnya bertemu mereka jadi saling suka dan memang diwajibkan menikah dengan warga asli patuk dan apa arti sidomulyo, sidomulyo sendiri diartikan selalu sukses dalam tindakan yang dilakukan desa. Dan warga di desa patuk kebanyakan profesinya dari dahulu adalah seorang petani sidomulyo sendiri juga bisa diartikan selalu lancar dalam berpanen mulya hasilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sidomulyo terdiri dari 2 Dusun Yaitu patuk sidomulyo dan dusun patuk Pulo nah mengapa dinamakan patuk pulo desa ini adalah desa seberang yang terpisah dengan sungai besar dan masyarakatnya lebih sedikit dibandingkan dengan dusun patuk sidomulyo mengapa juga dinamakan dusun patuk pulo karena dusun mereka berbentuk seperti pulau yang kecil dan menyebrangi sungai besar maka dari itu sekarang dibangunlah jembatan gantung antar dua dusun ini.

**a. Letak Geografis**

Secara administratif desa patuk sidomulyo merupakan salah satu dari 322 desa yang berada dikabupaten Sidoarjo. Terletak diwilayah kecamatan Krian bagian barat Kabupaten Sidoarjo. Kondisi wilayah desa Patuk sidomulyo merupakan daerah dataran rendah dengan keinggian rata-rata 15 mdpl. Luas wilayah desa Patuk Sidomulyo yaitu 242,358 ha yang terdiri dari dua dusun tersebut, jumlah penduduk kurang lebih 3.027 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.774,24 jiwa/km. Luas wilayah di dominasi oleh lahan persawahan basah dan perkarangan. Desa ini berbatasan dengan kelurahan jeruk legi dan kelurahan tempel. Desa ini terdiri dari Dua Dusun Yitu Dusun Patuk Sidomulyo dan Dusun Patuk Pulo. Mayoritas warga desanya adalah bekerja sebaga petani pekerjaan lain yang cukup banyak dilakoni warga Patuk adalah sebagai tukang bangunan. Pemuda – pemudi di desa ini banyak yang kuliah dan banyak juga yang merantau sebagai TKI setelah mereka menyelesaikan sekolah menengah Akhirnya atau (SMA). Desa Patuk Sidomulyo mempunyai jarak ke Kabupaten Kota jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang lebih 17 km, waktu yang ditempuh adalah 30 menit.

**b. Kondisi Demografis**

Berdasarkan kemutakhiran desa pada tahun 2018 jumlah penduduk ada 3.027 jiwa. Diantaranya adalah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.522 dan perempuan 1.505, dengan jumlah keseluruhan terdapat 1.046 kepala keluarga (KK). Wilayah desa patuk sidomulyo sendiri terbagi menjadi dua Dusun yaitu Dusun Patuk Sidomulyo dan Dusun Patuk Pulo.

**Tabel 4.5**

**Jumlah Kependudukan Desa Sidomulyo**

| No. | Kualifikasi | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Laki-laki | 1.522 | Orang |
| 2. | Jumlah Perempuan | 1.505 | Orang |
| 3. | Jumlah total Kependudukan | 3.027 | Orang |
| 4. | Jumlah Kepala Keluarga | 1.046 | KK |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

Berdasarkan penjelasan tabel diatas diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sejumlah 1.522 dan perempuan 1505. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walaupun selisihnya tidak terlalu besar jumlahnya lebih sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penduduk laki-laki. Dengan demikian, secara kuantitas perempuan memiliki potensi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada pemuda – pemudi desa dimana pada usia-usia produktif berpotensi sebagai kader perubahan desa menuju keberdayaan.

Mengenai jumlah penduduk usia produktif dan non produktif akan di jelaskan pada tabel berikut ini yaitu :

**Table 4.6**

**Jumlah Kependudukan Usia Produktif dan Non Produktif Desa Sidomulyo**

| No | Usia | Perempuan | Laki-laki |
|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk Usia 0-6 Tahun | 188 | 200 |
| 2 | Penduduk Usia 7-18 tahun yang masih sekolah | 381 | 384 |
| 3 | Penduduk usia 18-56 tahun (a+b)<br>a. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja<br>b. Penduduk usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja | <br>701<br>202 | <br>421<br>204 |
| 4 | Penduduk usia 56 tahun keatas | 40 | 386 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Total | 1.505 | 1.522 |

**Sumber data Profil Desa Tahun 2018**

Terdapat beragam usia penduduk di Desa Patuk Sidomulyo dan akan dikategorikan secara ringkas agar dapat memudahkan bagi para pembaca. Anak berumur 0-6 tahun berjumlah 388 anak, dengan perincian 200 jiwa anak laki-laki dan 188 anak perempuan. Usia 7-18 tahun yang masih sekolah terdapat 756 dengan pembagian 384 anak berjenis kelamin laki-laki dan 381 anak berjenis kelamin perempuan. Terakhir adalah usia 56 tahun keatas, di desa patuk sidomulyo terdapat 386 orang laki-laki dan 40 orang perempuan non produktif. Selama ini desa sudah terdapat perhatian lebih untuk para lansia dari posyandu desa, yakni terdapat pemeriksaan rutin setiap satu bulan sekali secara gratis.

**c. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia , karena pendidikan bertugas menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan Negara. Sebenarnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan sudah cukup baik, akan tetapi minat mereka untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang tinggi masih kurang. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat pedesaan yang tergolong menengah kebawa. Namun, terdapat beberapa masyarakat Desa Patuk Sidomulyo beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan seseorang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi yang menyebabkan masyarakat desa salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persepsi mengenai pendidikan . dan akhirnya mereka tidak berminat melanjutkan pendidikan jenjang tingginnya.

**d. Kondisi Perekonomian**

Mata pencaharian masyarakat di desa patuk sidomulyo paling banyak adalah berprofesi sebagai petani, tidak jarang pula yang menjadi buruh tani. Selain petani terdapat pula profesi sebagai peternak , peternak disini bermacam-macam diantaranya peternak kambing , sapi, ayam, dan lele.namun biasanya profesi sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan disela-sela kesibukannya bertani. Ada terdapat satu pekerjaan peternak yang merupakan pekerjaan utama yakni sebagai peternak ayam.

**e. Kondisi agama dan kebudayaan**

Masyarakat desa patuk sidomulyo memiliki kepercayaan agama islam secara keseluruhan .akan tetapi masyarakatnya masih melakukan ritual-ritual adat kejawen, seperti ruwatan, slametan, dan sebagainya. Ketaatan agama desa patuk sidomulyo bisa dibilang cukup baik , terlihat dari banyak mushola yang berdiri. Meskipun jaamaah sholatnya tidak selalu penuh akan tetapi keperdulian terhadap agama sudah dibilang baik. Mereka memperhatikan fasilitas keagamaan yang ada di lingkungannya. Mereka sadar akan kebutuhan agama yang juga menjadi kebutuhan masyarakat secara rohani. Bahkan masyarakat selalu mengadakan kegiatan pengajian umum rutinan setiap hari kamis yang diikuti oleh ibu-ibu. Sedangkan kegiatan untuk bapak-bapak dilakukan setiap hari kamis malam pada malam hari yang disebut “yasinan” oleh mereka. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kebudayaannya sendiri , mereka masih melakukan acara tradisional yang sudah dipercayai. Mali dari tahlil, ruwatan, ruwah deso, ritual adat pernikahan dan sebagainya. Untuk kegiatan Ruwah deso selalu di lakukan setiap satu tahun sekali dengan mengadakan acara wayang terkadang juga kuda lumping. Mengenai hal seperti itu merupakan permintaan dari masyarakat sendiri untuk jenis hiburan yang akan di laksanakan.

Terkait dengan data dan fokus penelitian, penulis akan memfokuskan penelitian pada bagian subjek dan objek. Dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dan dikumpulkan langsung dari informan penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.[56] Terkait dengan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi penelitian yaitu Kepala Desa Patuk Sidomulyo dan Sekertaris Desa dan juga beberapa masyarakat di dusun Patuk dan Dusun Patuk Pulo.

Berikutnya adalah data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penulis melalui pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitiannya. Data sekunder sendiri dapat diartikan sebagai data pendukung yang berupa data dokumentasi atau data yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa undang-

[56] Syaifuddin azwar, " metodologi penelitian , (Yogyakarta, pustaka pelajar , 2010) hlm 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini antara lain buku,jurnal, data internet dengan sumber yang terpercaya serta arsip yang didapat dari Kelurahan Desa Patuk Sidomulyo. Dengan adanya data primer dan data sekunder yang telah didapat oleh penulis, dapat memberikan manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah. Dengan data hasil dari penelitian yang relevan dan dapat dipercaya.

**Bagan 4.1**

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo**

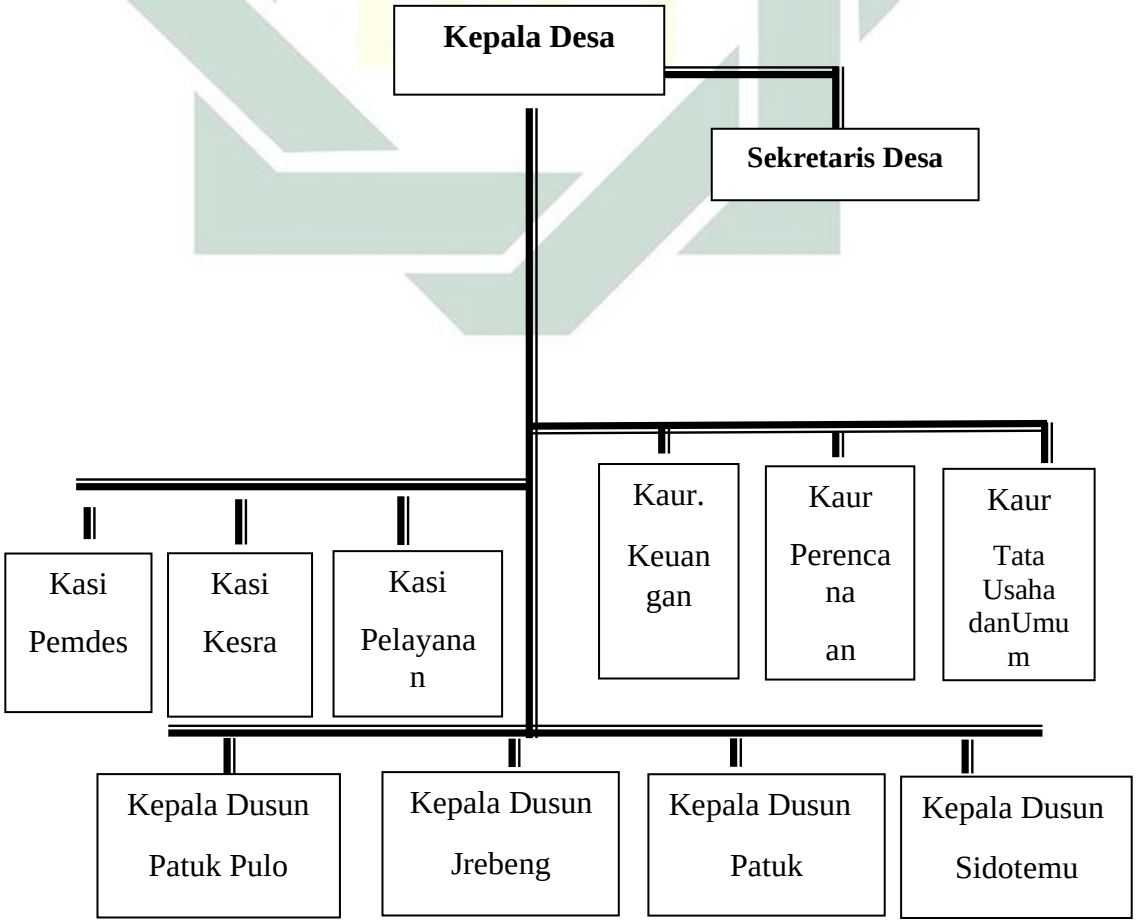


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 4.7**

**Nama Pejabat Pemerintah Sidomulyo**

| No | Nama Pejabat | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | H.Kunadi.SH | **Kepala Desa** |
| 2 | Andie Dwi H.B | **Sekretaris Desa** |
| 3 | Rinda Ananta Ddevi | **Kaur Keuangan** |
| 4 | Kuswono | **Kaur. Tata Usaha Dan Umum** |
| 5 | Fachrul Ardi Pratama | **Kaur Perencanaan** |
| 6 | Sunaifah | **Kasi Pemerintahan** |
| 7 | H.Arba'i | **Kasi Pelayanan** |
| 8 | M.iwan dahlan | **Kasi Kesra** |
| 9 | Djoko Santoso | **Kasun Patuk Pulo** |
| 10 | Sugeng Prayitno | **Kasun Jrebeng** |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Akemat Zaini | **Kasun Patuk** |
| 12 | Aris Agus Utomo | **Kasun Sidotemu** |

**Tabel 4.8**

**Jobdesk Pemerintah Desa Sidomulyo**

| NO. | Nama Pejabat | Tugas Pokok | Fungsi Pemerintah |
|---|---|---|---|
| 1 | H.Kunadi.SH<br>(Kepala Desa) | 1.Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br>2.Mengajukan Rancangan Desa<br>3. Menetapkan aturan-aturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (BPD)<br>4.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br>5.Membina Kehidupan masyarakat desa<br>6.Membina ekonomi desa<br>7.Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif<br>8.Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan<br>9.Melaksanakan wewenang | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | lain sesuai dengan peraaturan perundang-undangan. | |
| 2 | Andie Dwi H.B (Sekretaris Desa) | 1.Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa. | a.penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.<br>b. melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan.<br>c. melaksanakan tugas kepala desa apabila berhenti sementara.<br>d. penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | e.penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan;dan f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. |
| 3 | Rinda Ananta Devi (Kaur Keuangan) | Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). | a.Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa b.Persiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);dan c.Pelaksanaan tugas |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | lain yang diberikan oleh Sektretaris Desa |
| 4 | Kuswono (Kaur Tata Usaha & Umum) | Membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. | a.Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.<br>b.pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.<br>c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.<br>d.pelaksanaan, penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | perbaikan peralatan kantor. e.pengelolan administrasi perangkat desa. Persiapan bahan-bahan laporan; dan f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. |
| 5 | Fachrul Ardi Pratama (Kaur Perencanaan) | Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi Perencanaan Desa. | a.menyusun rencana anggaran pendaapatan dan belanja desa (APBDes) b.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan c.melakukan monitoring |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | d.evaluasi program<br>e.penyusunan laporan |
| 6 | Sunaifah<br>(Kasi Pemerintahan) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintah desa. | a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.<br>b.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.<br>c.mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.<br>d.menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL). Sesuai bidang tugasnya. e.menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). |
| 7 | H.Arba'I<br><br>(Kasi Pelayanan) | a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya<br>b.melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah di tetapkan dalam APBDes.<br>c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kelanjutan.<br>d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan.<br>e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dsa;<br>f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan | a.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat<br>b.melaksanakan kegiatan peningkatan swadaya murni, gotong-royong, dan partisipasi masyarakat.<br>c. pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat.<br>d. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kegiatan. | e.inventarisasi dan pemeliharaan aset desa.<br>f.penyelenggaraan pelayanan perijinan. |
| 8 | M.iwan dahlan (Kasi Kesra) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. | a.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.<br>b.pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.<br>c.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Djoko Santoso (Kasun Patuk Pulo) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. | a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan peengelolaan wilayah Dusun Patuk Pulo. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | masyarakat dalam menjaga lingkungan Dusun Patuk Pulo. d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Dusun Patuk Pulo. |
| 10 | Sugeng Prayitno (Kasun Jrebeng) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. | a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan peengelolaan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | wilayah Dusun Jrebeng.<br>b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.<br>c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Dusun Jrebeng.<br>d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pemerintahan dan pembangunan di Dusun Jrebeng. |
| 11 | Akemat Zaini (Kasun Patuk Sidomulyo) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. | a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan peengelolaan wilayah Dusun Patuk Sidomulyo. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Dusun Patuk Sidomulyo. d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Dusun Patuk Sidomulyo. |
| 12 | Aris Agus Utomo (Kasun SidotemuS) | Bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. | a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan peengelolaan wilayah Dusun Sidotemu.<br>b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.<br>c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Dusun Sidotemu. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Dusun Sidotemu. |

**Visi dan Misi**

**Visi**

Sesuai dengan Visi desa Sidomulyo kecamatan krian kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

"**MEMBANGUN DESA DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG JUJUR DAN MASYARAKAT DESA SIDOMULYO YANG SEJAHTERA, MANDIRI DENGAN LANDASAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH SWT "**

- **SEJAHTERA**

  Arti kata sejahtera sangatlah luas karena sudah memuat akan segala aspek kebutuhan manusia, maka perlunya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal dan masyarakat sendiri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memutuskan/menentukan tingkat kesejahteraan sendiri, karena itu harus mau bekerja keras untuk mengusahakan atau membuat lapangan kerja baru guna mencapai kesejahteraan itu sendiri.

- **MANDIRI**

  Menjamin kebebasan berbeda pendapat dan menerima saran / pendapat orang lain, tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Diharapkan tercapainya kondisi saling mengerti, saling mengingatkan, memberikan dan menerima saran demi kemajuan bersama.

- **KEIMANAN DAN KETAQWAAN**

  Yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang tenteram, tenang dan kondusif dengan menghormati, mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum, norma, agama dan norma adat serta nilai-nilai positif yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat.

**Misi**

Misi yang akan diwujudkan dalam pembangunan desa lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan
   a. Pemantapan Kapasitas management pemerintahan desa dan peningkatan mutu pelayanan prima masyarakat;
   b. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa bekerja sama dengan RT dan RW serta lembaga yang ada didesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bidang Ekonomi dan Sosial

a. Membangun pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha UKM/ Koperasi yang berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan , demi kesejahteraan masyarakat dalam rangkah pengentasan warga yang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu.

b. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu baik melalui jamkesmas atau jamkesda.

c. Bidang Infrastruktur

a. Menindaklanjuti pembenahan pembangunan sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah, rumah warga yang kurang mampu, Wcnisasi dan sarana olahraga yang bekerjasama dengan program-program pemerintah diantaranya KOTAKU

b. Melaksanakan pembenahan jalan Desa, saluran air serta berusaha menciptakan saluran-saluran air yang baru untuk menghindari genangan-genangan air di lingkungan pemukiman masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 79

Perencanaan

(8) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(9) Perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunsecara berjangka meliputi :

c. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desaa untuk jangka waktu 6 tahun

d. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan didesa.

(12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

(13) Program Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanannya kepada desa.

(14) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 80

(5) Perencanaan pembangunan desa sebaagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

(6) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(7) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas , program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau/ anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

(8) Prioritas, program, kegiatan, dan atau kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

f. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

g. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

h. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

i. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi , dan,

j. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 81

Pelaksanaan

(6) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(7) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

(8) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(9) Pembangunan lokal brskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

(10) Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa diinformasikan kapada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Pasal 82

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

(5) Masyarakat desa berhaak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

(6) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembanguna desa.

(7) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembanguna desa terhadap pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan musyawarah desa.

(8) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , Rencana Kerjaa Pemerintah Desa , dan anggaran pendapatan dan Belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**4. Realisasi Pembangunan di desa Sidomulyo**

**a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa**

- Pembangunan kantor pelayanan tahap II
- Pembuatan dinding relief taman kantor desa sisi timur
- Pembangunan polindes tahap 2

**b. Pembangunan dan perbaikan selokan / Drainase**

- Pembangunan selokan saluran air dsn.sidodukuh RT OO1 / RW 001
- Pembangunan selokan saluran air dsn.patuk RT.001,002 / RW 005

**c. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan umum**

- Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman dsn. Jrebeng RT 005/ RW 002 menuju RT 03 / RW 03
- Pemavingan jalan baru di dsn.patuk RT 003 / RW 005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemavingan jalan baru dsn.patuk RT 001/ RW 005 dan dsn.Sidotemu RT 002 / RW 006
- Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) & urugan jalan lingkungan dsn.sidotemu RT 001 / RW 006 dan dsn.Patuk RT 004/ RW 005
- Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman dsn.patuk RT 003 / RW 004 menuju Jembatan Gantung

**d. Perawatan mushola dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo**

**5. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sidomulyo**

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa Sidomulyo yakni melalui tahap-tahap berikut :

a. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada bada permusyawaratan desa (BPD) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

b. Naskah rancangan disampaikan kepada para anggota badan permusyawaratan desa (BPD) selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat BPD dilaksanakan untuk menetapkan peraturan desa. Rapat tersebut selain dihadiri oleh pemerintah desa, juga dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan materi peraturan desa tentang APBDes tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembahasan rancangan APBDes tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa).
d. Pengambilan keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa dilakukan Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Rancangan APBDes.
e. Setelah rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD, kemudian ditetapkan dan ditanda tanganin oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
f. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa, paling lambat 3 (Tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama BPD disampaikan kepada Bupati di evaluasi.
g. Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi rapat.
h. Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Data Fokus Penelitian

### 1. Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis , konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi , dan pendampingan. Di dalam penelitian ini terdapat Strategi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sehingga peneliti ingin memberikan Dasar hukum tentang Peraturan Menteri Desa sebelum menjelaskan tentang Undang-undang Desa , Peraturan Pemerintah Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

**a. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :**

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Pembangunan Desa

Pasal 5

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

a. Perencanaan Pembangunan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pengawasan Pembangunan Desa; dan

d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Penetapan daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

(3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:

a. perangkat daerah kabupaten/kota;

b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d. pihak lainnya.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. penyusunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(6) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antarDesa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan; dan

b. pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 50

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:

a. penetapan Pelaksana Kegiatan;

b. penyusunan rencana kerja;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;

d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;

e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan

kegiatan;

f. penyiapan dokumen administrasi;

g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;

h. pengadaan tenaga kerja; dan

i. pengadaan bahan/material.

Paragraf 1

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 51

(1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(3) Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

**b. Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pada Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjelaskan bahwa :

Pasal 78

(1) Pembanguna desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan.

(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadialn sosial.[57]

[57] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 79

Perencanaan

(15) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(16) Perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunsecara berjangka meliputi :

e. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desaa untuk jangka waktu 6 tahun

f. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(17) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(18) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan didesa.

(19) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(20) Program Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanannya kepada desa.

(21) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

(9) Perencanaan pembangunan desa sebaagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

(10) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

(11) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas , program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau/ anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

(12) Prioritas, program, kegiatan, dan atau kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

k. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

l. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

n. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi , dan,

o. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 81

Pelaksanaan

(11) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(12) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

(13) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(14) Pembangunan lokal brskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

(15) Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa diinformasikan kapada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Pasal 82

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

(9) Masyarakat desa berhaak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(10) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembanguna desa.

(11) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembanguna desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan musyawarah desa.

(12) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , Rencana Kerjaa Pemerintah Desa , dan anggaran pendapatan dan Belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.[58]

**2. Hasil Pembahasan data**

**a. Jenis-jenis Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo**

Pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo merupakan sebuah tindakan merealisasikan program oleh pemerintah Desa sidomulyo dalam pengalokasian dana desa.

**Tabel 3.3**

**Data pembangunan infrastruktur Desa**

**Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo**

| No | Uraian Kegiatan Pembangunan | Anggaran |
|---|---|---|

[58] Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan kawasan Pedesaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pembangunan dan Pemeliharaan kantor dan Balai desa | |
| | -Pembangunan Kantor Pelayanan Masyarakat desa tahap II | 200.937.500,00 |
| | -Pembuatan dinding relief taman kantor desa yang terletak di sisi timur | 21.260.000,00 |
| | -Pembuatan Polindes tahap 2 | 168.879.100,00 |
| 2. | Pembangunan dan perbaikan selokan / drainase | |
| | -Pembangunan selokan saluran air dsn.sidotemu RT OO1 / RW 001 | 57.261.000,00 |
| | -Pembangunan selokan saluran air dsn.patuk RT.001,002 / RW 005 | 80.491.000,00 |
| 3. | Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan umum. | |
| | -Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman dsn. Jrebeng RT 005/ RW 002 menuju RT 03 / RW 03 | 180.000.000,00 |
| | -Pemavingan jalan baru di dsn.patuk RT 003 / RW 005 | 15.170.000,00 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| | -Pemavingan jalan baru dsn.patuk RT 001/ RW 005 dan dsn.Sidotemu RT 002 / RW 006 | 105.106.900,00 |
| | -Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) & urugan jalan lingkungan dsn.sidotemu RT 001 / RW 006 dan dsn.Patuk RT 004/ RW 005 | 107.236.249,00 |
| | -Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman dsn.patuk RT 003 / RW 004 menuju Jembatan Gantung | 73.021.000,00 |
| 4. | Perawatan Musholah dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo | 17.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **1.026.362.749,00** |

Sumber : Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat empat (4) pembangunan yang dilakukan di Desa Sidomulyo sejumlah 1.026.362.749,00 sebagai bentuk perbaikkan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna memberikan kemudahan akses dan perbaikan mutu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan dan perbaikan yang diadakan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan akses yang di dapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelas penulis akan memaparkan Realisasi pembangunan Infrastruktur fisik tahun anggaran 2019 Desa Sidomulyo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo :

1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa

- Pembangunan kantor pelayanan masyarakat desa tahap II

  Pembangunan kantor pelayanan masyarakat desa tahap II menghabiskan dana sebesar 200.937.500,00. Besarnya dana yang di keluarkan oleh desa tersebut agar masyarakat layak dalam menggunakan fasilitas pelayanan masyarakat dari Desa.

- Pembuatan dinding relief taman kantor desa yang terletak di sisi timur

  Pembangunan pembuatan dinding relief taman kantor desa Sidomulyo menghabiskan dana sebanyak 21.260.00,00. Pembangunn ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas di Balai Desa Sidomulyo.

- Pembangunan polindes

  Pembangunan polindes menghabiskan dana sebanyak 168.879.100,00. Pembangunan Polindes dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana Desa terhadap kesehatan masyarakat, serta untuk membantu masyarakat yang kurang mampu bila kekurangan dana ketika melahirkan, sehingga bisa di layani oleh bidan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembangunan dan perbaikan selokan / drainase

   - Pembangunan selokan saluran air dsn.sidotemu RT 001/RW001 sebesar 57.261.000,00. Pembangunan gorong-gorong yang dilakukan di RT 001 / RW 001dikarenakan kondisi gorong-gorong di dusun sidotemu banyak yang rusak dan saluran air tidak lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pembangunan selokan saluran air Dsn.Patuk RT 001/ 002 / RW 005 sebesar 80.491,000,00. Pembangunan gorong-gorong di 2 titik di RT 001 dan RT 002 di bangun untuk memperbaiki gorong-gorong yang telah rusak.

3. Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Umum
   - Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman Dsn. Jrebeng RT 005 / RW 002 menuju RT 003 / RW 003 menghabiskan dana sebesar 180.000.000,00.
   - Pemavingan jalan baru Dsn. Patuk RT 003 / RW 005 menghabiskan dana sebesar 15.170.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemavingan jalan baru Dsn. Patuk RT 001 / RW 005 dan Dsn.sidotemu RT 002 / RW 006 menghabiskan dana sebesar 105.106.900,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) dan urugan jalan lingkungan Dsn. Sidotemu RT 001 / RW 006 dan Dsn. Patuk RT 004 / RW 005 menghabiskan dana sebesar 107.236.249,00.

- Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman Dsn. Patuk RT 003 / RW 004 menuju jembatan gantung menghabiskan dana sebesar 73.021.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perawatan Mushola dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo.

**b. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (d) dan ayat 4 tentang Desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan asli daerah berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Di bagi untuk setiap Desa secara Proposional merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa sidomulyo mengalokasikan dana desa pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 sudah terealisasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Alokasi Dana desa Sidomulyo sebesar 1.026.362.749,00 yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019.

Pembangunan infrastruktur/ Fisik yang di lakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 menghabiskan dana dengan Total 1.026.362.749,00 dana tersebut di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Dusun-dusun Sidomulyo. Realisasi pembangunan fisik di Desa Sidomulyo berupa pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa, pembangunan dan perbaikan selokan / Drainase, serta pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan umum. Di Desa Sidomulyo juga ada pembangunan jembatan gantung/ jembatan penghubung melainkan pembagunan jembatan gantung ini tidak semua berasal dari alokasi dana desa melainkan sumber dananya berasal dari APBN serta APBDes. Dana APBN yang di gunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seebsar Rp.328,4 juta dan APBDes yang di gunakan sebesar Rp.8,85 juta. Pembangunan jembatan gantung merupakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW ) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

**c. Aspek kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo**

1. Aspek sarana dan prasarana

Rusaknya jalan pavingisasi dan sarana prasana pemukiman dusun patuk pulo yang mengakibatkan warga patuk pulo merasa dusunnya belum merasa terpenuhi dalam hal pembangunan infrastruktur.

2. Aspek peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

Pembangunan di harapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Karena jika aspek peningkatan kualitas hisup tidak berjalan maka aspek lain juga kurang terpenuhi.

3. Aspek pemerataan pembangunan

Pemerataan pembangunan dilakukan dengan upaya pemerataan pada pembangunan infrastruktur agar bisa terpenuhi dan meratanya antara pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana dengan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Melalui peberdayaan masyarakat ini di arahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya alam yang dimiliki.

**b. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**

Tim pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Sidomulyo ini diutus langsung oleh kepala desa yaitu yang terdiri dari Kasi Kesra sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretaris dalam pembangunan, dan Pemilik Toko bangunan/penjual material.

## C. Analisa Data dan Pembahasan

### 1. Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian , Kabupaten Sidoarjo

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu rencana pimpinan pucuk yang berfokus jangka panjang. Disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai, dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat meningkat dan terus-menerus serta dilakukan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh masayrakat di masa depan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang di ambil oleh seseorang / badan / lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Strategi mengenai pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Desa Sidomulyo Strategi Pembangunan Desa Sidomulyo sudah diatur dalam Dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang dirancang oleh pemerintah Desa. Strategi Pembangunan infrastruktur desa sidomulyo meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan , dan Pengawasan.

Hal ini Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak H.Kunadi.SH, selaku Kepala Desa Sidomulyo, yang menyatakan bahwa :

*”Yang pertama (1) Strategi Perencanaan, melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide, salah satu strategi pemerintah atau langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pasrtisipasi dari masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Cara ini merupakan cara yang sangat baik karena sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu di libatkan. Secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi secara langsung dan apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan. Dalam hal ini cara yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*bekerja. Dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa dalam proses pembangunan desa peran serta dari masyarakat selalu menjadi yang utama pastisipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembangunan didesa. Cara yang demikian juga kita pahami sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hal ini muncul pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang menurut pemerintah bisa menjadi sebuah program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang kedua (2) strategi pelaksanaan membentuk misi dan menggambarkan kepada semua aktifitas peran aktif dari pemerintah merupakan salah satu bentuk motivasi dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan. Indikator penilaian masyarakat kepada pemerintah inilah dimana pemerintah atau pemerintah desa menjadi pelaksana kegiatan atau memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan inilah bentuk salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap pemerintah Desa. Strategi Pelaksanaan yaitu pelaksanaan kinerja dalam partisipasi masyarakat berbentuk tenaga, proses pembangunan didesa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan masyarakat merupakan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan. Salah satu bentuk pasrtisipasi dari masyarakat inilah dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan salah satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang ketiga (3) yaitu strategi pengawasan, dimana para pemerintah desa melihat kondisi dan situasi dilapangan serta melihat adakah kendala atau penghambat saat pembangunan dilaksanakan".*[59]

Dari ungkapan yang telah disampakain tersebut maka penulis bisa mengetahui bahwa strategi mengenai pembangunan infrastruktur desa memang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 guna mengatur mengenai perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di desa.

[59] Kunadi.SH, Wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan strategi kebijakan Desa Sidomulyo berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Pada tahap pertama yaitu:

**1. Strategi Perencanaan**

**a. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide**

Salah satu strategi pemerintah atau langkan yang di tempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawara yang di lakukan oleh pemeri ntah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat.

Cara ini sangat baik, karena sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu dilibatkan, sehingga peran serta dari masyarakat itu terlibat dari apa yang dikemukakakn oleh masyarakat desa tersebut. Cara demikian juga dipahami oleh pemerintah adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hal ini muncul pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang menurut pemerintah bisa menjadi sebuah program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perencanaan merupakan proses awal dari satu tujuan atau target yang ingin dicapai. Inti dari perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.Tahap perencanaan didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh H.Kunadi.SH , Selaku Kepala Desa Sidomulyo :

*"Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik desa menggunakan bentuk pendekatan partisipatif dimana masyarakat harus ikut serta dan mengetahui segala bentuk kegiatan dan tahap-tahapan untuk melakukan sebuah pembangunan tersebut. Yang pertama yaitu di mulai dari musyawarah Dusun dan musyawarah Desa, Sebelum sebuah Program terbentuk yang dilakukan Desa yaitu musyawarah Desa tujuannya untuk menyusun rencana pemerintah Desa dalam satu tahun, dalam musyawarah desa tersebut pemerintah desa menyaring dan menerima masukan-masukan dari masyarakat apa saja yang diinginkan masyarakat baik pembangunan fisik (Pembangunan jembatan, lingkungan dan pemukiman, gedung, dan perbaikan sarana dan prasarana desa) maupun pembangunan non Fisik (usaha perbaiakan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan sosial budaya).setelah itu pemerintah desa akan menkaji kembali terutama dalam hal pembangunan infrastruktur mana yang masuk dalam skala prioritas dalam musyawarah desa itu yang didahulukan".*[60]

Hal ini pun sama apa yang disampaikan oleh Andie Dwi H.B, Selaku Sekretaris desa Sidomulyo :

[60] H.Kunadi.SH , wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"masyarakatnya dengan lembaga pemberdayaan masyarakat bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masayrakat desa. Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masayarakat akan lebih maju sejahtera dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Peranan yang dilakukan pemerintah desa adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya manusia. Meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa".*[61]

Dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa sangat transparansi dan selalu mengikutsertakan masyarakat dan selalu menjunjung tinggi aspirasi dan harapan masyarakat agar tersampaikan dan terwujudnya mimpi-mimpi masyarakat desa Sidomulyo. Serta desa selalu mendengarkan partisipasi masyarakat desanya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desanya.

Didalam proses perencanaan tentunya ada keberhasilan dari sebuah pengimplementasian atau sebuah penerapan pada tahap-tahapnya dalam teori George C.Edward III (1980), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi pemutar balikan fakta implementasi.

[61] Andie Dwi H.B , wawancara 5 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya yang disampaikan oleh H.Kunadi.SH :

"*Sebelum sebuah Program terbentuk yang dilakukan Desa yaitu musyawarah Desa tujuannya untuk menyusun rencana pemerintah Desa dalam satu tahun, dalam musyawarah desa tersebut pemerintah desa menyaring dan menerima masukan-masukan dari masyarakat apa saja yang diinginkan masyarakat baik pembangunan fisik (Pembangunan jembatan, lingkungan dan pemukiman, gedung, dan perbaikan sarana dan prasarana desa) maupun pembangunan non Fisik (usaha perbaiakan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan sosial budaya).setelah itu pemerintah desa akan menkaji kembali terutama dalam hal pembangunan infrastruktur mana yang masuk dalam skala prioritas".*[62]

Hal diatas dapat dijelaskan bahwasannya aspirasi masyarakat sangatlah penting untuk menyalurkan ide-ide keinginan masyarakat untuk melihat bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan impian masyarakatnya. Dengan adanya musyawarah tersebut masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah desa masih mendengarkan keluhan-kelurah yang selama ini mereka rasakan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

[62] H.Kunadi.SH , wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti : komitmen , kejujuran, dan demokratis.

Seperti hal nya yang disampaikan oleh H.Kunadi.SH Selaku kepala Desa Sidomulyo :

*"Keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan. Salah satu bentuk pasrtisipasi dari masyarakat inilah dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan salah satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan".*[63]

Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemimpin atau sebuah wakil masyarakat harus bersifat demokratis karena tanpa adanya masyarakat pemerintah desa akan kesusahan dalam apa yang diinginkan oleh masyarakat desanya.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengarus yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

[63] Wawancara H.Kunadi.SH Kepala Desa Sidomulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Strategi Pelaksanaan**

**b. Partisipasi dalam bentuk tenaga**

Proses pembangunan didesa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Di karenakan masyarakat merupakan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyrakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan desa. Biasanya bantuan dari masyarakat yaitu terjun langsung menjadi pelaku atau pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh H.Kunadi.SH selaku Kepala Desa Sidomulyo :

"*pada saat pelaksanaan masyarakat ikut serta dalam gotong royong, dikarenakan pada saat pembangunan infrastruktur fisik*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*desa dan jembatan gantung ini masyarakat membantu gotong royong membersihkan selokan atau saluran air serta membersihkan jalan arah menuju jembatan nya yang dipenuhi semak-semak belukar"*

Hal ini juga disampaikan oleh Andie Dwi H.B, Selaku sekretaris desa :

*"kalau saya kira masyarakat selalu gotong royong dalam pembangunan di desa tersebut dikarenakan pemerintah desa selalu memerintahkan para kasun untuk memberikan edaran kerja bakti jika ada kegiatan pembangunan desa yang sekiranya masyarakat dapat membantu serta pembangunan jembatan gantung ini merupakan pembangunan besar kalau dalam lapangan pada saat pembangunannya sih tidak ada karena disitu kita kan dibantu oleh peralatan-peralatan berat disitu kita hanya memantau dan melihat kondisi lapangan. Mungkin pada saat membersihkan pinggiran-pinggiran itu kita sedikit kesulitan karena saat itu air saat tinggi-tingginya dan kita menyeruhkan masyarakat untuk kerja bakti lebih seperti itu sih".*

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Suyitno,selaku masyarakat dusun Patuk Pulo :

*"kalo kerja bakti biasanya setiap bulannya kita memang ada itu berupa pembersihan gorong-gorong atau saluran air kalo keikutsertaan dalam pelaksanaannya secara mendetail saya rasa tidak ada dikarenakan ini kan jembatan penghubung dan di bawahnya kan sungai besar arusnya juga deras jadi warga hanya membantu saat sebelum pembangunan, warga membantu kerja bakti membersihkan arah jalan menuju jembatan gantung tersebut, sebelumnya memang sudah jalan dikarenakan kan memang dulunya du pakai kapal penambang untuk akses antar dusun, tetapi itu masih sempit jadi sedikit dilebarkan itu sih keikutsertaanya"*[64]

Hal ini juga disampaikan oleh Bu eni, selaku Mayarakat Dusun Patuk Sidomulyo :

*"kalau keikutsertaan pada saat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gorong-gorong dan pembangunan jembatannya tidak sih ya karena kan ini jembatan lumayan panjang dan di bawahnya juga kan sungai besar arusnya juga deras jadi pada*

[64] Suyitno, wawancara 6 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*saat pembangunannya sih tidak mungkin pada saat sebelum pembangunannya iya. Dikarenakan arah jalannya kan masih banyak rumput-rumput ilalang karena kan memang tidak dirawat karena dulu dipakai untuk jalan menuju kapal tambang. Jadi, tidak seberapa terawat maka dari itu kita warga patuk sidomulyo khusunya yang dekat dengan arah jalan ini kami kerja bakti untuk sedikit melebarkan jalan dengan membersihkan rumput-rumput ilalang dan pinggir-pinggir sungai,dan itu juga dilakukan sama di Dusun Patuk Pulo. Jika pembangunan gorong-gorong atau lainnya itu memang biasanya bergotong royong"*[65]

Dari beberapa informan diatas pada saat pelaksanaan dalam proses pembangunan yang dilakukan pemerintah desa adalah menyeruhkan masyarakat dua dusun yaitu dusun Patuk Sidomulyo dan Dusun Patuk Pulo untuk melakukan kerja bakti dimasing-masing dusun untuk membersihkan masing-masing jalan arah menuju jembatan yang akan dibangun. Tidak ada hal yang menyangkut pembangunannya langsung karena pemerintah desa sudah menyiapkan tim khusus dalam pembangunan jembatan tersebut.

**3. Strategi Pengawasan :**

Pada proses pengawasan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa.

[65] Bu Eni, wawancara 6 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Hal ini disampaikan oleh H. Kunadi.SH, bahwasannya :*

*"proses pengawasan yang saya lakukan pada saat turun lapangan yaitu untuk meminimalisir tingginya kesalahan para karyawan atau para tukang bahasa lainnya disini agar tidak membuat kesalahan, jika ada kesalahan pun kita dapat mengingatkan secara langsung bila kita memantau di lokasi. Jikalau tanpa ada pengawasan yang baik kita juga akan mendapatkan tujuan yang kurang maksimal. Jadi pengawasan yang saya lakukan yaitu mengevaluasi tempat, melihat kondisi juga, serta lancar atau tidaknya kondisi di lapangan. Cuman pada saat musyawarah mengenai proses pembangunan jembatan gantung tersebut masyarakat selalu diikut andilkan didalamnya".*[66]

Hal tersebut juga di sampaikan oleh bapak Suyitno, selaku warga Dusun Patuk Pulo :

*"saya selaku penjual bahan bangunan disini ya mbak yang saya ketahui masyarakat hanya perantara jika ada bahan yang habis nah itu biasanya kalau bahan materialnya ada di tempat saya, pemerintah desa membelinya disaya dan para tukang atau pekerja nya itu akan lapor ke saya apa saja yang habis. Kalau proses lapangannya masyarakat kurang tau dikarenakan dilapangan kan sudah ada team yang mengatur masyarakat ya Cuma lihat prosesnya dari jauh saja. Tetapi pada saat ada musyawarah desa mengenai pembangunan jembatan gantung tersebut pasti ada l satu atau dua orang yang mewakili untuk musyawarah didesa".*[67]

Dari beberapa informan dijelaskan bahwa proses pengawasan selama pembangunan infrastruktur dan pembangunan jembatan gantung di desa Sidomulyo tepatnya di Dusun Patuk Pulo masyarakat tidak seberapa tahu dalam proses pengawasan yang dilakukan pemerintah desa tersebut. Masyarakat hanya mengetahui adanya pembangunan jembatan didusunnya tetapi tidak semua masyarakat desa mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Hanya saja

[66] H. Kunadi.SH, wawancara 5 Februari 2020
[67] Suyitno, wawancara 6 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa warga dusun yang mewakili untuk musyawarah di balai desa.

- **Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sidomulyo**

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa Sidomulyo yakni melalui tahap-tahap berikut :

a. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada bada permusyawaratan desa (BPD) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
b. Naskah rancangan disampaikan kepada para anggota badan permusyawaratan desa (BPD) selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat BPD dilaksanakan untuk menetapkan peraturan desa. Rapat tersebut selain dihadiri oleh pemerintah desa, juga dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan materi peraturan desa tentang APBDes tersebut.
c. Pembahasan rancangan APBDes tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa).
d. Pengambilan keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa dilakukan Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Rancangan APBDes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Setelah rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD, kemudian ditetapkan dan ditanda tanganin oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

f. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa, paling lambat 3 (Tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama BPD disampaikan kepada Bupati di evaluasi.

g. Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi rapat.

h. Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- **Proses pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo**

Proses pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**1. Pelaksanaan**

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Sidomulyo, para perangkat desa ikut berperan penting dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBDes, karena perangkat desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan bidangnya. Perangkat desa semua berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti sekretaris desa, sebagai pelaksana teknis dibantu dengan kaur sesuai bidangnya misalnya dalam hal keuangan di bantu oleh kaur keuangan. Seperti yang diutarakan oleh Kunadi.SH, selaku Kepala Desa, beliau mengatakan :

*"semua memang harus berperan yang dilakukan sesuai dengan bidangnya, karena perangkat desa tugasnya sebagai pengelola kegiatan".*[68]

Hal tersebut juga disampaikan oleh Andie Dwi H.B, selaku sekretaris desa :

*"iya seluruh perangkat desa harus ikut andil dan berperan tidak hanya para kaur saja karena perangkat desa memiliki fungsi yang penting perbidang-bidangnya".*[69]

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes pada pembangunan di Desa Sidomulyo sudah cukup baik dengan peraturan pemerintah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Seluruh kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan dan semua kegiatan disertai dengan rencana

[68] Kunadi.SH wawancara 5 Februari 2020
[69] Andie Dwi H.B wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran biaya lalu diverifikasi oleh sekretaris desa dan setelahnya akan disahkan oleh kepala desa.

Seperti yang dinyatakan oleh Kunadi.SH, selaku kepala desa Sidomulyo:

*"pembangunan di desa sidomulyo dilakukan sebaik mungkin dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang ada didesa, semua pembangunan diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Sidomulyo".*[70]

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Sidomulyo. Pelaksanaanya sudah cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah desa. APBDes dijakdikan sebagai acuan dan pemerintah desa telah melakukan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan dengan buku kas dan pembantu kegiatan.

**2. Pelaporan**

Didesa sidomulyo pada tahapan pelaporan pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014. Kepala desa menyampaikan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester akhir tahun. Pelaporan dana hasil pembangunan sudah tertulis dalam APBDes Sidomulyo.

Hal ini disampaikan oleh Kunadi.SH, selaku kepala Desa Sidomulyo:

*"semua pengeluaran dana desa untuk pembangunan desa sudah tertulis dan tertera di APBDes desa Sidomulyo".*[71]

[70] Kunadi.SH wawancara 5 Ffebruari 2020
[71] Kunadi. SH Wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Table 4.9**

**Realisasi Pembangunan infrastruktur / fisik tahun anggaran 2019 desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo**

| No | Uraian Kegiatan Pembangunan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1. | Pembangunan dan Pemeliharaan kantor dan Balai desa | |
| | -Pembangunan Kantor Pelayanan tahap II | 200.937.500,00 |
| | -Pembuatan dinding relief taman kantor desa di sisi timur | 21.260.000,00 |
| | -Pembuatan Polindes tahap 2 | 168.879.100,00 |
| 2. | Pembangunan dan perbaikan selokan / drainase | |
| | -Pembangunan selokan saluran air dsn.sidodukuh RT OO1 / RW 001 | 57.261.000,00 |
| | -Pembangunan selokan saluran air dsn.patuk RT.001,002 / RW 005 | 80.491.000,00 |
| 3. | Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan umum. | |
| | -Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman dsn. Jrebeng RT 005/ RW 002 menuju RT 03 / RW 03 | 180.000.000,00 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| | -Pemavingan jalan baru di dsn.patuk RT 003 / RW 005 | 15.170.000,00 |
| | -Pemavingan jalan baru dsn.patuk RT 001/ RW 005 dan dsn.Sidotemu RT 002 / RW 006 | 105.106.900,00 |
| | -Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) & urugan jalan lingkungan dsn.sidotemu RT 001 / RW 006 dan dsn.Patuk RT 004/ RW 005 | 107.236.249,00 |
| | -Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman dsn.patuk RT 003 / RW 004 menuju Jembatan Gantung | 73.021.000,00 |
| 4. | Perawatan Musholah dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo | 17.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **1.026.362.749,00** |

***Sumber : APBDes Pembangunan Desa Sidomulyo tahun 2019***

Dalam tahapan pelaporan pengelolaan APBDes perangkat desa sudah berperan dalam penyusunan laporan realisasi pembangunan pada APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, sementara yang menyampaikan kepada bupati adalah Kepala Desa. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya perangkat desa sebagai pelaksana harus ada karena perangkat desa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidangnya. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo.

**3. Pertanggungjawaban**

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di desa Sidomulyo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati / walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pemiayaan laporan. Laporan ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

1). Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan

2). Format laporan kekayaan milik desa per 21 Desember Tahun anggaran berkenaan

3). Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor pemerintahan desa Sidomulyo , mengungkapkan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan tepat waktu yaitu disetiap akhir tahun anggaran, seperti dinyatakan oleh bapak Kunadi.SH sebagai kepala desa Sidomulyo :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"harus tepat waktu karena harus disampaikan pada akhir tahun laporan realisasi yang manual duluan karena untuk tahap yang kedua harus ada realisasi terlebih dahulu".*[72]

Dalam tahap pertanggung jawaban pengelolaan APBDes perangkat desa memiliki prinsip bahwa dalam pengelolaan APBDes apa yang telah terencana harus tercapai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terlaksananya pembangunan di desa sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa, pembangunan dan perbaikan selokan / Drainase, pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman / jalan desa, kegiatan pembangunan dan perbaikan jembatan desa, pembangunan dan perbaikan gorong-gorong, dan perawatan musholah dan masjid wakof sewilayah desa sidomulyo.

- **Bentuk Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes )tentang pembangunan di Desa Sidomulyo:**

**Tabel 4.10**

**Bentuk Realisasi RPJMDes Desa Sidomulyo**

| |
|---|
| 1.Pembangunan dan Pemeliharaan kantor dan Balai desa. |
| 2.Pembangunan Kantor Pelayanan tahap II. |
| 3. Pembuatan dinding relief taman kantor desa di sisi timur |

[72] Kunadi.SH wawancara februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| |
|---|
| 4.Pembuatan Polindes tahap 2 Pembangunan dan perbaikan selokan / drainase. |
| 5.Pembangunan selokan saluran air dsn.sidodukuh RT OO1 / RW 001 |
| 6.Pembangunan selokan saluran air dsn.patuk RT.001,002 / RW 005 |
| 7.Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan umum. |
| 8.Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman dsn. Jrebeng RT 005/ RW 002 menuju RT 03 / RW 03 |
| 9.Pemavingan jalan baru di dsn.patuk RT 003 / RW 005 |
| 10.Pemavingan jalan baru dsn.patuk RT 001/ RW 005 dan dsn.Sidotemu RT 002 / RW 006 |
| 11.Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) & urugan jalan lingkungan dsn.sidotemu RT 001 / RW 006 dan dsn.Patuk RT 004/ RW 005 |
| 12.Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman dsn.patuk RT 003 / RW 004 menuju Jembatan Gantung |
| 13.Perawatan Musholah dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di Desa Sidomulyo terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan:**

(1). Strategi Perencanaan: melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide, salah satu strategi pemerintah atau langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pasrtisipasi dari masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Cara ini merupakan cara yang sangat baik karena sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu di libatkan. Secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi secara langsung dan apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan. Dalam hal ini cara yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja. Dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa dalam proses pembangunan desa peran serta dari masyarakat selalu menjadi yang utama pastisipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembangunan didesa. Cara yang demikian juga kita pahami sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang menurut pemerintah bisa menjadi sebuah program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

(2). strategi pelaksanaan : membentuk misi dan menggambarkan kepada semua aktifitas peran aktif dari pemerintah merupakan salah satu bentuk motivasi dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan. Indikator penilaian masyarakat kepada pemerintah inilah dimana pemerintah atau pemerintah desa menjadi pelaksana kegiatan atau memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan inilah bentuk salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap pemerintah Desa. Strategi Pelaksanaan yaitu pelaksanaan kinerja dalam partisipasi masyarakat berbentuk tenaga, proses pembangunan didesa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan masyarakat merupakan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan. Salah satu bentuk pasrtisipasi dari masyarakat inilah dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(3).Strategi pengawasan, dimana para pemerintah desa melihat kondisi dan situasi dilapangan serta melihat adakah kendala atau penghambat saat pembangunan dilaksanakan.

**2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.**

**A. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dari adanya pembangunan infrastruktur desa Sidomulyo dan jembatan gantung didusun Patuk Pulo tersebut karena sebuah harapan dan cita-cita masyarakat. Faktor pendukung yang sangat terlihat yaitu pertama untuk akses sekolah , kedua kemauan dari masyarakat yang sangat tinggi, sering terjadinya banjir apabila air sungai penuh

Hal tersebut disampaikan oleh Kunadi SH, Selaku kepala desa Sidomulyo :

*"faktor pendukung dari adanya pembangunan jembatan ini karena impian masyarakat supaya masyarakat Dusun Patuk Pulo tidak mencari Sekolah di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo yaitu Kabupaten Gresik dan agar bisa sekolah di daerah – daerah kecamatan maupun desanya sendiri di desa Sidomulyo , dan agar warga-warga yang bekerja di kabupaten sebelah yaitu di kabupaten Gresik tepatnya di daerah krikilan,dan driyorejo tidak jauh-jauh memutar lewat jalan Raya agar bisa memanfaatkan waktu yang lebih efisien. Serta adanya bantuan dana yang masuk untuk pembangunan desa,Intinya faktor pendukungnya yaitu karena kebutuhan masyarakat yang sangat-sangat urgent dan memang sangat-sangat membutuhkan bukan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*hanya untuk membantu fasilitas dua dusun antara dusun patuk dan dusun patuk pulo, kabupaten seberangpun bisa lewat dengan mudah efisiensi terhadap waktu dan tidak mengalami kemacetan tetapi jembatan gantung ini hanya bisa dilewati oleh pengendara motor saja. Ketika pembangunan jembatan penghubung antar dua dusun atau jembatan gantung ini sangat di sambut baik oleh masyarakat karena memang itu harapan dan cita-cita masyarakat desa sidomulyo.*[73]

**1. Sumber daya manusia/masyarakat**

Masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah pembangunan di desa dikarenakan masyarakat adalah sebagai pelaksana dan sasaran infrastruktur yang akan di bangun di Desa atau setiap Dusunnya. Pemerintah hanya sebagai perantara yang memfasilitasi agar dapat terlaksana sesuai petunjuk teknik operasiona yang telah ditentukan.

Dukungan masyarakat akan pembangunan di desanya menjadi faktor utama sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai keinginan masyarakat desa. Sama seperti yang disampaikan oleh H. Kunadi.SH, selaku kepala desa sidomulyo

*"faktor dari keberhasilan setiap program yang masuk ke desa karena adanya dukungan dari masyarakat, baik program dalam bentuk fisik maupun non fisik, dalam rapat di balai desa setiap wakil dari setiap dusun juga saya beritahu bahwa pentingnya keikutsertaan mereka baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan sampai tahap pengawasan".*[74]

Dalam wawancara diatas dukungan dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat penting dan mendukung dalam pencapaian efektifitas pencapaian yang

[73] Kunadi SH, wawancara 5 Feruari 2020
[74] Wawancara H.Kunadi.SH Kepala Desa Sidomulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan. Pembangunan fisik desa seperti pembangunan gorong-gorong, pembangunan mushola, dan perbaikan jalan merupakan hasil kerja gotong royong masyarakat desa, pemerintah hanya mengawasi bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik.

**2. Faktor Dana**

Faktor dana juga tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, karena masyarakat tidak dapat mengerjakan suatu kegiatan tanpa didukung ketersediaan dana. Seperti halnya yang disampaikan oleh H.Kunadi.SH selaku kepala Desa Sidomulyo :

*"faktor yang memudahkan kami dalam memfasilitasi dikarenakan adanya dana desa yang dikeluarkan oelh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik di setiap desa dari Kabupaten maupun Provinsi. Dana operasional sangatlah membantu pemerintah desa dalam mengefisienkan anggaran dana desa untuk kebutuhan masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam menjalnkan tugas-tugas kami.*[75]

Dari wawancara diatas peneliti dapat mengutip bahwa dana operasional dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik.

**3. Akses Sekolah**

Sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan dan kelanjutan hidup manusia, dengan tidak adanya sekolah maka kualitas pendidikan masyarakat yang ada

[75] Wawancara H.Kunadi.SH Kepala Desa Disomulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwilayah tersebut jadi terganggu. Besarnya harapan anak-anak desa Sidomulyo tepatnya didusun Patuk Pulo untuk melanjutkan pendidikannya sangat baik. Mereka rela bersekolah di Kabupaten sebelah tepatnya di kecamatan Krikilan karena minimnya akses untuk mereka bersekolah didesanya sendiri. Terhambatnya akses sungai mereka jadi seperti terasingkan oleh desanya. Sehingga masyarakat Dusun tersebut sangat-sangat mendambakan akses yang lancar untuk desa mereka. Dengan adanya pembangunan jembatan gantung di dusun Patuk Pulo tersebut masyarakat disana seperti mendapatkan angin segar dan segera terwujud impiannya untuk terfasilitasi dalam infrastrukturnya. Dengan adanya jembatan gantung tersebut masyarakat yang mendapatkan dampak postitif nya juga tidak hanya dusun patuk pulo saja, tetapi dusun patuk sidomulyo juga dapat merasakan karena adanya pembangunan jembatan gantung tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kunadi.SH Selaku Kepala Desa Sidomolyo :

*"faktor pendukung dari adanya pembangunan jembatan ini karena impian masyarakat supaya masyarakat Dusun Patuk Pulo tidak mencari Sekolah di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo yaitu Kabupaten Gresik dan agar bisa sekolah di daerah – daerah kecamatan maupun desanya sendiri di desa Sidomulyo".*

Seperti hal nya yang disampaikan oleh bapak Suyitno selaku masyarakat Dusun Patuk Pulo :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*”perubahan atau dampak yang terlihat pada akses sekolah lebih dekat dan mudah, lalu kita juga lebih mudah dan hubungan masayarakatnya lebih mudah, dan tidak ada yang terasingkan”.*[76]

Dari kedua informan di atas bahwasannya pembangunan jembatan tersebut tidak hanya untuk fasilitas desa semata,tetapi juga karena adanya dorongan dari masyarakat untuk merasakan dan kemudahan fasilitas dari Desa.

**4. Kemauan Yang Kuat Dari Masyarakat**

Keinginan masyarakat yang tinggi akan perubahan membuat pemerintah Desa Sidomulyo semakin ingin mewujudkan agar bisa menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh desa. Dorongan dari masyarakat desa yang sangat ingin memperbaiki akses jalannya mereka mengeluarkan aspirasinya ke desa untuk diwujudkan mimpinya. Karena sebelum jembatan gantung ini dibangun masyarakat desa sangat sulit untuk menempuh ke desa seberang belum lagi membahayakan keselamatan masyarakat tersebut :

Hal ini sampaikan oleh Andie Dwi H.B selaku sekretaris desa Sidomulyo :

*“Dahulu sebelum dibangunnya jembatan gantung ini masyarakat harus mengeluarkan uang untuk menyebrang menggunakan perahu tambang untuk menuju antar dusun atau desa dan belum lagi kalau hujan air naik itu sangat-sangat membahayakan siapapun yang menaikinya”.*[77]

[76] Suyitno, wawancara 6 Februari 2020
[77] Andie Dwi H.B, wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga disampaikan oleh Bu eni selaku Masyarakat Dusun Patuk Sidomulyo :

*"hal tersebut sangat bermanfaat itu kalo menurut saya fasilitasnya mbak dan saya berterimah kasih kepada kepala desa dan pemerintah desa sudah mendengarkan aspirasi masyarakat dan kalau saya pribadi adanya pembangunan jembatan gantung ini memang saat bermanfaat untuk siapapun terutama saya karena suami saya kan tidak jauh-jauh lagi lewat jalan raya dan tidak membahayakan juga".*[78]

Hal tersebut sudah terjawab bahwasannya masyarakat dusun tersebut memang sangat menginginkan perubahan dan tidak adanya kesenjangan disetiap dusun jikalau dusun lain bisa enak dengan fasilitasnya kenapa juga dusun patuk Pulo tidak dapat merasakan hal serupa. Jadi dengan adanya pembangunan jembatan tersebut masyarakat sangat-sangat merasa suaranya terdengar oleh pemerintah desa.

Teori Merillee S.Grindle menjelaskan tentang keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi :

Yang pertama tentang bvariabel isi kebijakan :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

[78] Bu eni, wawancara 6 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sumber program telah menyebutkan implementatornya dengan rinci,
6. Apakah sumber dayanya telah memadai

   Sedangakan variabel lingkungan implementasinya mencakup :

   1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
   2. Karakteristik intuisi rezim yang sedang berkuasa,
   3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dengan relevansinya teori diatas bahwasannya adanya keberhasilan sebuah implementasi hal ini disampaikan oleh bu eni selaku masyarakat dusun Patuk Sidomulyo :

*"peran kepala desa dalam pembangunan jembatan ini menurut saya cukup baik ya kan memang dikarenakan desa ini sangat membutuhkan fasilitas seperti ini jadi menurut saya ini pembangunan yang tepat. Karena bisa memudahkan dan memfasilitasi masayarakatnya".*[79]

Hal ini juga disampaikan oleh Suyitno selaku masyarakat Dusun Patuk Sidomulyo :

*"dampak yang dapat dirasakan secara langsung yaitu memang fasilitasnya kita lebih mudah untuk akses kemanapun dan anak-anak di dusun Patuk pulo lebih dekat sekolahnya dibangdingkan tahun-tahun sebelumnya anak-anak sekolahnya bukan didesa sendiri malah di desa orang lain karena ya itu tadi sulitnya akses antar dusun. Maka dari ini pembangunan jembatan gantung ini sangat menunjang kehidupan masyarakat dapat meningkatkan kwalitas pembangunan*

[79] Bu eni , wawancara 6 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*infrastruktur desanya khusunya pada pembangunan jembatan gantung ini, dan memang pembangunan jembatan gantung ini memudahkan transportasi khususnya roda dua sehingga masyarakat secara umum lebih efektif dan efisien".*[80]

Keberhasilan mengimplementasikan kebijakan merupakan tujuan utama para pengimplementator. Pemimpin yang baik akan mendengarkan keluh kesah dan aspirasi dari masyarakat. Karena masyarakat merasa bahwa pemerintah desa sangat mementingkan keperluan dan kepentingan masyarakat desanya.

**5. Seringnya banjir saat air sungai meluap**

Masyarakat dusun Patuk pulo desa Sidomulyo sering rumah nya kebanjiran akibat meluapnya air sungai dan kurang tingginya lengsengan sehingga diperlukan pembangunan lengsengan di tepi-tepi sungai, hal tersebut disampaikan oleh Kunadi.SH selaku kepala desa Sidomulyo :

*"pemerintah desa sidomulyo sudah mengupayakan untuk adanya pembangunan dan perbaikan lengsengan sungai untuk meminimalisir adanya luapan air dari sungai, pemerintah desa mengeluarkan dana sebesar 13.341.750,00 untuk pembangunan dan perbaikan lengsengan tepi sungai, tetapi mbak sebelah dusun tersebut itu hampir semua dikelilingi oleh pabrik jadi resapan air di dusun tersebut kurang optimal. Jika hujan turun berhari-hari masyarakat dusun tersebut masih tetap kebanjiran karena luapan air sungai.*[81]

Dari pernyataan di atas bahwasannya pemerintah desa sudah mengupayakan untuk adanya perbaikan fasilitas disetiap dusun di desanya akan tetapi ada faktor lain yang mengakibatkan dusun tersebut masih mengalami kebanjiran.

[80] Suyitno , wawancara 6 februari 2020
[81] Kunadi.SH wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur di Desa Sidomulyo:

  1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan , jembatan, serta jalan infrastruktur strategis lainnya. Dengan tujuan diatas maka arah kebijakan desa yang akan ditujua antara lain :

     (a). Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

     (b). Meningkatkan ekonomi pertanian dalam arti luas perdagangan dan industri

     (c). Meningkatkan sarana dan prasaran kesehatan.

     (d). Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

     (e). Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pemerintahan.

Didalam Proses strategi dan kebijakan tentunya ada keberhasilan dari sebuah pengimplementasian atau sebuah penerapan pada tahap-tahapnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam bentuk data yang diperoleh pada saat proses wawancara dan turun lapangan.

**B. Faktor Penghambat**

Selain adanya faktor pendukung dibaliknya selalu ada faktor yang menghambat, dari adanya kelancaran sebuah impian selalu ada kekuarangan yang belum tercapai faktor penghambat saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrastruktur desa dan jembatan gantung di Desa Sidomulyo tepatnya didusun Patuk Pulo tersebut karena dari faktor sulitnya akses saat pembangunan.

**1. Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam melaksanakan sebuah program pembangunan di desa. Hal ini di asumsikan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan mampu memahami dan menjawab persoalan tugas dan pekerjaan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya mereka yang memiliki pendidikan rendah kurang mampu memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini disampaikan oleh H.Kunadi.SH selaku Kepada desa Sidomulyo :

*"Setiap bulan kita selalu menghadirkan musrawarah di Balai Desa di dalam rapat ini selalu dihadiri sebagian dari masyarakat yang terbagi dari perwakilan setiap dusunnya, serta sebagian masyarakat juga ikut andil di rapat tersebut ketika kita menjelaskan sebagian dari mereka masih ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan apalagi kalau membahas mengenai dana selalu ada yang belum faham dan terjadi miskomunikasi"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sidmulyo menjadi kendala sekaligus tantangan bagi pemerintah sidomulyo untuk memberikan edukasi lebih kepada masyarakatnya. Pemberian binaan dan pengarahan dapat memberi edukasi kemasyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan peran mereka disaat adanya pembangunan infrastruktur desa.

**2. Partisipasi masyarakat**

Pada saat adanya pembangunan infrastruktur Fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa sidomulyo masyarakat cenderung cuek dan hanya tertentu yang mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Di Desa Sidomulyo ini partisipasi masyarakat desa ada tetapi sangat minim. Disetiap acara MusDes tokoh masyarakat yang diundang tidak berangkat, hanya setengah saja yang berangkat dari yang diundang dengan alasan ada yang sibuk bekerja dan tidak mau tau urusan pemerintaha. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Andie Dwi H.B selaku sekretaris desa sidomulyo :

*"Aslinya banyak mbak masyarakat disini tiap ada kegiatan musyawarah atau kerja bakti gitu selalu di undang, tapi ya gitu yang hadir tidak semua, hanya beberapa saja, karena ada yang kerja jadi tidak bisa hadir".*[82]

**3. Budaya Patrenalistik**

Masyarakat masih sering menitik beratkan semua persoalan kepada kepala desa, semuanya dipercayakan sepenuhnya kepada kepala desa sebagai pemimpin di desa dan masyarakat

[82] Andie Dwi H.B wawancara 5 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung acuh. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Kunadi.SH, selaku kepala desa, beliau mengatakan:

*"masyarakat desa disini sendiri itu terlalu menyerahkan itu semua kepada saya selaku kepala desa disini mbak, jadi mereka kayak "wes sampeyan ae sing ngatur pak". Itu juga yang mempersulit saya. Sedangkan untuk hal yang mendukung disini, kan sudah ada undang-undangnya mbak itu yang membantu juga untuk saya dan perangkat desa yang lain membagi alokasi dana nya, dan Alhamdulillah warga semua mau kerja sama dan gotong royong mbak".*[83]

**4. Penghambatan Pada Proses Pembangunan**

Pada saat pembangunan infrastruktur desa yang berupa pembangunan fisik seperti pembangunan perbaikan gorong-gorong dan pembangunan jembatan gantung tersebut dikarenakan pembangunan yang kurang adanya sifat sadar diri dari masyarakat dan alat bantu kerja. Disaat pembangunan jembatan gantung kurangnya fasilitas dari desa sehingga sebagian masyarakat harus rela menyebrangi sungai menggunakan perahu kecil dikarenakan terhalangi oleh sungai yang besar yang arus sungai yang deras. Serta tempat yang sudah jarang dilewati terjadi akses jalan menuju pembangunan jembatan terhalangi oleh rumput-rumput ilalang yang sangat tinggi. Pada saat proses pembangunan jembatan gantung di desa sidomulyo tepatnya di dusun patuk pulo tersebut bantuan dari masyarakat berupa tenaga dengan membersih kan akses

[83] Kunadi S.H, wawancara 5 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan menuju arah yang akan di bangunnya jembatan tersebut dan juga jangka waktu yang panjang.

Hal ini disampaikan oleh Kunadi S.H, selaku kepala desa Sidomulyo :

"*faktor penghambatnya mungkin lebih kepada saat kerja bakti akan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung tersebut dikarenakan medannya bersebrangan dengan sungai besar, pembersihan atau kerja bakti yang diikutsertai oleh masyarakat itu butuh waktu selama satu minggu hanya untuk kerja bakti biasa saja. Serta dikarenakan pembangunan tersebut harus melewati sungai yang arusnya deras jadi membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat proses pembangunan. Jangka waktu yang harus dilakukan kurang lebih 12 bulan dikarenakan melihat cuaca dilapangan".*[84]

Hal ini pun disampaikan juga oleh Andie Dwi H.B selaku sekretaris desa Sidomulyo :

*"kalau saya kira faktor penghambatnya karena pembangunan jembatan gantung ini merupakan pembangunan besar kalau dalam lapangan pada saat pembangunannya sih tidak ada karena disitu kita kan dibantu oleh peralatan-peralatan berat disitu kita hanya memantau dan melihat kondisi lapangan. Mungkin pada saat membersihkan pinggiran-pinggiran itu kita sedikit kesulitan karena saat itu air saat tinggi-tingginya dan kita menyeruhkan masyarakat untuk kerja bakti lebih seperti itu sih faktornya sedikit ada rasa takut kalau terjadi apa-apa karena itu juga kan sungai besar dan arusnya juga deras".*[85]

Dari kedua informan diatas bahwasannya memang faktor penghambatnya dikarenakan akses pembangunan jembatan yang sulit serta dikarenakan akses yang sulit terjadinya penghambatan proses pembangunan jembatan tersebut

[84] Kunadi S.H, wawancara 5 Februari 2020
[85] Andie Dwi H.B, wawancara 5 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung cuaca pada saat itu jika air sungai naik proses pembangunan harus diberhentikan belum lagi cuaca yang ekstream.

## C. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data , maka diperlukan simpulan terhadap pengambilan intisari dari sajian data yang merupakan hasil temuan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa permasalahan yang terjadi pada saat pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo. Temuan hasil penelitian berbeda dengan hasil pembahasan, temuan hasil penelitian merupakan data yang di peroleh dan di temukan keganjalan pada saat proses penelitian di luar dari sebuah hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah diperoleh dilapangan , peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian diuraikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 4.12**

**Temuan Hasil Penelitian**

| No | Temuan Hasil Penelitian |
|---|---|
| 1 | Kurangnya keterbukaan perangkat Desa karena adanya ketakutan dari Kepala Desa mengenai dana desa dan tidak ada yang mau mengungkapkan secara gamblang mengenai dana desa tersebut dikarenakan adanya masa transisi pemilihan Kepala Desa. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| 2 | Data mengenai Keuangan atau dana desa kurang tranparansi sehingga penulis kesulitan terhadap penulisan APBDes. |
| 3 | Mantan Kepala Desa hanya mengungkapkan mengenai proses pembangunan desa tetapi kurang menyampaikan menghenai hal keuangan pembangunan desa. |
| 4 | Kurangnya data dari pemerintah desa terhadap RKPDes Sidomulyo sehingga peneliti hanya mengetahui Rencana pembangunan desa melalui wawancara dengan mantan kepala desa. |
| 5 | Pembangunan jembatan gantung di desa sidomulyo tersebut mengenai informasi dari perangkat desa tentang dana yang dikeluarkan, mengatakan bahwa hampir 90% uang dari APBN dan APBDes 10%. |
| 6 | Kurangnya data mengenai APBDes dan RKPDes sehingga penulis kesulitan untuk mengetahui pemerataan pembangunan disetiap dusun-dusun. Penulis hanya ingin memastikan bahwa pembangunan di Desa Sidomulyo merata. |
| 7 | Alasan utama dibangunnya jembatan gantung didesa Sidomulyo dan tepatnya didusun Patuk Pulo bukan hanya untuk jembatan penghubung antar dusun saja melainkan dari sebuah aspirasi dan cita-cita masyarakat yang ingin akan perubahan pada nasib dusunnya. Bahwasannya mereka menganggap desanya memang seperti namanya patuk Pulo yang berarti di pulau karena sebelumnya dusun tersebut akses untuk ke antar dusun pun sangat sulit. Masyarakat dusun patuk pulo tidak ingin dusunnya merasa |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| | diasingkan dan dibedakan. Dusun-dusun yang ada diseberang sangat gampang fasilitasnya sedangkan dusun patuk pulo harus terhalang sungai besar yang deras arus airnya. Serta karena cita-cita masyarakat yang tinggi pemerintah desa melakukan musyawarah desa yang di hadiri oleh beberapa kasun-kasun untuk mengutarakan aspirasi dari masyarakatnya apa yang mereka butuhkan, dan ditimbang dengan musyawarah manakah pembangunan yang harus didahulukan. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diperjelaskan maka penulis memberikan kesimpulan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan fisik atau pembangunan yang bisa di ukur seperti pembangunan sarana dan prasarana prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan pelayanan sosial serta kegiatan sosial kemasyrakatan dan meningkatkan aksebelitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedasaan adalah pembagunan jembatan, pengaspalan jalan, sarana air bersih dan lainnya.

Pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan pelayanan sosial serta kegiatan sosial kemasyrakatan dan meningkatkan aksebelitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedasaan adalah pembagunan jembatan, pengaspalan/pavingisasi jalan, sarana air bersih dan lainnya. Pembangunan dilaksanakan untuk mempermudah hidup masyarakat sehingga tidak cenderung bergantung pada satu aspek saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Teori Implementasi Kebijakan, Teori George C.Edwards III (1980) yang mempunyai 4 (empat) variabel penting :

1. Komunikasi

   Komunikasi adalah sarana dan prasarana untuk menyampaikan tujuan.

2. Sumber Daya

   Sumber daya adalah faktor utama dalam pembangunan infrastruktur desa agar lebih efektif.

3. Dispoisi

   Disposisi adalah watak/ karakter yang dimiliki implementator, contoh : sifat demokratis, dan kejujuran

4. Struktur Birokrasi

   Struktur birokrasi yang bertugas sebagai pengimplementasian kebijakan.

- Jenis Penelitian

  Dalam Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif.

- Teknik Pengumpulan Data

  - Teknik Observasi

    Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Teknik wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan.

- **Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian , Kabupaten Sidoarjo**

- **Strategi Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses awal dari satu tujuan atau target yang ingin dicapai. Inti dari perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.Tahap perencanaan didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

- **Strategi Pelaksanaan**

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

- **Strategi Pengawasan :**

Pada proses pengawasan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa.

➢ **Realisasi Pembangunan di desa Sidomulyo**

**1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa**

e. Pembangunan kantor pelayanan tahap II

f. Pembuatan dinding relief taman kantor desa sisi timur

**g.** Pembangunan polindes tahap 2

**2. Pembangunan dan perbaikan selokan / Drainase**

h. Pembangunan selokan saluran air dsn.sidodukuh RT OO1 / RW 001

i. Pembangunan selokan saluran air dsn.patuk RT.001,002 / RW 005

**3. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan umum**

j. Peninggian dan pemavingan jalan lingkungan pemukiman dsn. Jrebeng RT 005/ RW 002 menuju RT 03 / RW 03

k. Pemavingan jalan baru di dsn.patuk RT 003 / RW 005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pemavingan jalan baru dsn.patuk RT 001/ RW 005 dan dsn.Sidotemu RT 002 / RW 006

m. Pembuatan tembok penahan tanah (TPT) & urugan jalan lingkungan dsn.sidotemu RT 001 / RW 006 dan dsn.Patuk RT 004/ RW 005

n. Pembangunan rabat beton jalan lingkungan pemukiman dsn.patuk RT 003 / RW 004 menuju Jembatan Gantung

**4. Perawatan mushola dan masjid wakof se wilayah Desa Sidomulyo**

- **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di Desa Sidomulyo terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan:**

(1). Strategi Perencanaan: melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide, salah satu strategi pemerintah atau langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pasrtisipasi dari masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat. Cara ini merupakan cara yang sangat baik karena sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu di libatkan. Secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi secara langsung dan apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan. Dalam hal ini cara yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja. Dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa dalam proses pembangunan desa peran serta dari masyarakat selalu menjadi yang utama pastisipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembangunan didesa. Cara yang demikian juga kita pahami sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hal ini muncul pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang menurut pemerintah bisa menjadi sebuah program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

(2). strategi pelaksanaan : membentuk misi dan menggambarkan kepada semua aktifitas peran aktif dari pemerintah merupakan salah satu bentuk motivasi dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan. Indikator penilaian masyarakat kepada pemerintah inilah dimana pemerintah atau pemerintah desa menjadi pelaksana kegiatan atau memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan inilah bentuk salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap pemerintah Desa. Strategi Pelaksanaan yaitu pelaksanaan kinerja dalam partisipasi masyarakat berbentuk tenaga, proses pembangunan didesa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan masyarakat merupakan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan. Salah satu bentuk pasrtisipasi dari masyarakat inilah dalam pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan salah satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(3).Strategi pengawasan, dimana para pemerintah desa melihat kondisi dan situasi dilapangan serta melihat adakah kendala atau penghambat saat pembangunan dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo yang berupa pembangunan jalan dan irigasi serta Alasan utama dibangunnya jembatan gantung di dusun patuk pulo bukan hanya untuk penghubung antar dusun melaikan karena aspirasi dan cita-cita masyarakat yang sudah lama terpendam. Dusun patuk pulo mengiginkan adanya perubahan nasib terhadap dusunnya mereka menginginkan tidak adanya kesenjangan diantara dusun-dusun lainnya. Faktor pendidikan jadi alasan masyarakat untuk pentingnya pembangunan jembatan gantung tersebut dikarenakan akses yang tidak mudah. Masyarakat patuk pulo sangat ingin cita-citanya diwujudkan. Strategi pada pembangunan jembatan gantung di dusun patuk pulo tersebut sudah memenuhi atau sama dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi 3 strategi yaitu strategi perencanaan, strategi pelaksanaan , serta strategi pengawasan.Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo , Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari adanya pembangunan infrastruktur desa Sidomulyo dan jembatan gantung didusun Patuk Pulo tersebut karena sebuah harapan dan cita-cita masyarakat. Faktor pendukung yang sangat terlihat yaitu pertama untuk akses sekolah , kedua kemauan dari masyarakat yang sangat tinggi, sering terjadinya banjir apabila air sungai penuh

### 1. Sumber daya manusia/masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah pembangunan di desa dikarenakan masyarakat adalah sebagai pelaksana dan sasaran infrastruktur yang akan di bangun di Desa atau setiap Dusunnya. Pemerintah hanya sebagai perantara yang memfasilitasi agar dapat terlaksana sesuai petunjuk teknik operasiona yang telah ditentukan.

Dukungan masyarakat akan pembangunan di desanya menjadi faktor utama sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai keinginan masyarakat desa.

### 2. Faktor Dana

Faktor dana juga tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, karena masyarakat tidak dapat mengerjakan suatu kegiatan tanpa didukung ketersediaan dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**3. Akses Sekolah**

Sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan dan kelanjutan hidup manusia, dengan tidak adanya sekolah maka kualitas pendidikan masyarakat yang ada diwilayah tersebut jadi terganggu. Besarnya harapan anak-anak desa Sidomulyo tepatnya didusun Patuk Pulo untuk melanjutkan pendidikannya sangat baik. Mereka rela bersekolah di Kabupaten sebelah tepatnya di kecamatan Krikilan karena minimnya akses untuk mereka bersekolah didesanya sendiri. Terhambatnya akses sungai mereka jadi seperti terasingkan oleh desanya. Sehingga masyarakat Dusun tersebut sangat-sangat mendambakan akses yang lancar untuk desa mereka. Dengan adanya pembangunan jembatan gantung di dusun Patuk Pulo tersebut masyarakat disana seperti mendapatkan angin segar dan segera terwujud impiannya untuk terfasilitasi dalam infrastrukturnya. Dengan adanya jembatan gantung tersebut masyarakat yang mendapatkan dampak postitif nya juga tidak hanya dusun patuk pulo saja, tetapi dusun patuk sidomulyo juga dapat merasakan karena adanya pembangunan jembatan gantung tersebut.

**4. Kemauan Yang Kuat Dari Masyarakat**

Keinginan masyarakat yang tinggi akan perubahan membuat pemerintah Desa Sidomulyo semakin ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan agar bisa menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh desa. Dorongan dari masyarakat desa yang sangat ingin memperbaiki akses jalannya mereka mengeluarkan aspirasinya ke desa untuk diwujudkan mimpinya. Karena sebelum jembatan gantung ini dibangun masyarakat desa sangat sulit untuk menempuh ke desa seberang belum lagi membahayakan keselamatan masyarakat tersebut. masyarakat dusun tersebut memang sangat menginginkan perubahan dan tidak adanya kesenjangan disetiap dusun jikalau dusun lain bisa enak dengan fasilitasnya kenapa juga dusun patuk Pulo tidak dapat merasakan hal serupa. Jadi dengan adanya pembangunan jembatan tersebut masyarakat sangat-sangat merasa suaranya terdengar oleh pemerintah desa.

## E. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dibaliknya selalu ada faktor yang menghambat, dari adanya kelancaran sebuah impian selalu ada kekuarangan yang belum tercapai faktor penghambat saat pembangunan infrastruktur desa dan jembatan gantung di Desa Sidomulyo tepatnya didusun Patuk Pulo tersebut karena dari faktor sulitnya akses saat pembangunan.

### 1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam melaksanakan sebuah program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan di desa. Hal ini di asumsikan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan mampu memahami dan menjawab persoalan tugas dan pekerjaan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya mereka yang memiliki pendidikan rendah kurang mampu memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah desa. tingkat pendidikan di Desa Sidmulyo menjadi kendala sekaligus tantangan bagi pemerintah sidomulyo untuk memberikan edukasi lebih kepada masyarakatnya. Pemberian binaan dan pengarahan dapat memberi edukasi kemasyarakat dalam melaksanakan peran mereka disaat adanya pembangunan infrastruktur desa.

**2. Partisipasi masyarakat**

Pada saat adanya pembangunan infrastruktur Fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa sidomulyo masyarakat cenderung cuek dan hanya tertentu yang mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Di Desa Sidomulyo ini partisipasi masyarakat desa ada tetapi sangat minim. Disetiap acara MusDes tokoh masyarakat yang diundang tidak berangkat, hanya setengah saja yang berangkat dari yang diundang dengan alasan ada yang sibuk bekerja dan tidak mau tau urusan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**3. Budaya Patrenalistik**

Masyarakat masih sering menitik beratkan semua persoalan kepada kepala desa, semuanya dipercayakan sepenuhnya kepada kepala desa sebagai pemimpin di desa dan masyarakat cenderung acuh.

**4. Penghambatan Pada Proses Pembangunan**

Pada saat pembangunan infrastruktur desa yang berupa pembangunan fisik seperti pembangunan perbaikan gorong-gorong dan pembangunan jembatan gantung tersebut dikarenakan pembangunan yang kurang adanya sifat sadar diri dari masyarakat dan alat bantu kerja. Disaat pembangunan jembatan gantung kurangnya fasilitas dari desa sehingga sebagian masyarakat harus rela menyebrangi sungai menggunakan perahu kecil dikarenakan terhalangi oleh sungai yang besar yang arus sungai yang deras. Serta tempat yang sudah jarang dilewati terjadi akses jalan menuju pembangunan jembatan terhalangi oleh rumput-rumput ilalang yang sangat tinggi. Pada saat proses pembangunan jembatan gantung di desa sidomulyo tepatnya di dusun patuk pulo tersebut bantuan dari masyarakat berupa tenaga dengan membersih kan akses jalan menuju arah yang akan di bangunnya jembatan tersebut dan juga jangka waktu yang panjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

### 1. Saran Kepada Pemerintah Desa

a. Seharusnya pemerintah desa lebih transparansi terhadap masyarakat desanya

b. Seharusnya pemerintah desa lebih mengikutsertakan masyarakat patuk pulo dalam strategi pengawasan pada saat proses pembangunan jembatan gantung di dusun patuk pulo.

c. Pemerintah desa seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat dusun lain untuk membantu gotong-royong pada saat pembersihan akses jalan menuju jembatan di dusun patuk pulo.

### 2. Saran Kepada Masyarakat desa

a. Seharusnya masyarakat dusun patuk pulo lebih aktif dalam rapat di Balai Desa agar mengetahui perkembangan proses pembangunan di desanya.

b. Serta lebih gotong royong dalam pembangunan infrastruktur desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik" Jurnal Publik Vol.11:No.01;2017, ISSN:1412-7083.

Adisasmita , Rahardjo, 2006. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta Graha Ilmu.

Agus Salim. 2002 , " Perubahan Sosial : Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di indonesia" (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana)

Alimas Jonsa, Samsiar, "Peran Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Ppembangunan Jangka menengah Tahun 2012-2017" Jurnal Muqoddimah Vol. 02, Nomor 1, Desember 2017.

Andi Asnudin, 2009."Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat" Jurnaal SMARTek, Vol.7, No.4, November.

Cut nanda keusuma dan Suriani, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan Vol.04 , Nomor 1, Mei 2015, ISSN. 2302-8408.

Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial"

Deky Aji Suseno, "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" Jurnal STIE Semarang, Vol 8, No 2, edisi Juni 2016 (ISSN : 2252-826)

Edi Suharto, 2008 " Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik" (Bandung: CV Alfabeta)

Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiono. "Impelementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.5


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husein Umar, 2010.“Desain Penelitian Manajemen Strategik”, (Jakarta: Rajawali Pers)

M.Irfan Islamy, 2007 “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara”, Jakarta, Bumi Aksara

Moloeng Lexy J.,2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakaya)

Muhammad Amin Cakrawijaya, Bambang Riyanto, dan Nuroji,2014. “Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.25, No.2 Agustus.

Murba , “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” Skripsi Prodi Ilmu Politik, Universitas Alauddin Makassar.

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan mengenai Desa

R.Bintaro, 1989 “Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya" (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Rachmat,2014. Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia

Sahya Anggara,2004 “ Kebijakan Publik” (Bandung: CV Pustaka Setia)

Setiawan Guntur,2004,”Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka,Jakarta”

Solichin Abdul Wahab,2015, “Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi Kebijakan Publik” (Jakarta: Bumi Aksara)

Sugiono,2015 “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”.(Bandung: Alfabeta).

Umar Husein, 2010 “Desain Penelitian Manajemen Strategik”, (Jakarta: Rajawali Pers)

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78 ayat 1 dan 2 )

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014), Pasal 1 Ayat (1)

Usman Nurdin , 2002 .”Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo,Jakarta”.

Wahjudin , dalam Nurman 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta,PT.RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1.

Wahyujudin, 2015 “dalam Nurman,Strategi Pembangunan Daerah” ,Jakarta,PT. Grafindo Persada, Cetakan ke-1.

William N. Dunn, 2000 “Analisis Kebijakan Publik”, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.

Winarno Budi , 2007, “Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi),yogyakarta,Media Pressindo

Yuanita Berlin, irwan noor, siswidiyanto, “pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada lokasi dampak semburan lumpur lapindo kecamatan porong kabupaten sidoarjo” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, No. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id